

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai mencakup pelbagai bidang kehidupan, baik sosial budaya, sumber daya manusia, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban sosial, hukum dan tata pemerintahan dan aparatur negara, pengembangan wilayah dan tata ruang, sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk dan telah mulai meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Manggarai.

Sejauh keberhasilan yang telah dinikmati, pembangunan masa lampau dan yang kini sedang berjalan masih berhadapan dengan dan menyisakan berbagai rintangan, tantangan dan masalah berkelanjutan yang tetap menjadi beban pembangunan daerah dan pembangunan nasional pada umumnya. Pembangunan masih belum meningkatkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*) masyarakat Manggarai secara adil dan merata. Dengan kata lain pembangunan belum melepaskan sebagian besar masyarakat Manggarai dari kemiskinan dan belum menyentuh pembangunan manusia seutuhnya.

Selain untuk mengatasi kekurangan atau mengatasi kelemahan pelaksanaan pembangunan pada masa lalu, juga sebagai pengaktualisasian eksistensi manusia sebagai *homo faber* yang berdinamika, maka pembangunan di Kabupaten Manggarai harus dilanjutkan secara terus menerus. Agar spirit ini berkelanjutan, maka diharuskan menyusun suatu rencana dan strategi pembangunan Kabupaten Manggarai dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025.

2.1. KONDISI DAERAH SAAT INI

2.1.1. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

2.1.1.1. Sumber Daya Manusia

Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan seluruh rangkaian proses pembentukan karakter manusia sebagai persona yang berharkat dan bermartabat sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, SDM yang berkualitas akan menjadi faktor kunci dan inti sebagai subjek sekaligus objek penentuan kemajuan masyarakat demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang berkeadilan dan berkelanjutan. Indikator kualitas SDM antara

lain tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakupi usia harapan hidup, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai dapat ditelusuri melalui indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks komposit tersebut mencakup 3 (tiga) aspek dasar pembangunan manusia yaitu Usia Hidup yang panjang (*longevity*) dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH); Tingkat Pengetahuan (*knowledge*) dengan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah; dan Standar Hidup yang Layak (*decent living standard*) dengan indikator GDP perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*).

Berdasarkan indeks komposit di atas, IPM Kabupaten Manggarai menunjukkan perkembangan yakni dari 64,5 (2005) menjadi 65,66 (2006) dan 65,78 (2007, peringkat 8 dari 19 Kabupaten se-NTT) (NTT Dalam Angka BPS 2007). IPM sebesar 65,78 pada tahun 2007 merupakan komposit dari indikator UHH orang-orang Manggarai sebesar 66,65 tahun, AMH sebesar 90,97%, dan Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 6,60 tahun.

Merujuk pada kondisi IPM Manggarai di atas, maka masalah sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai saat ini tidak terlepas dari faktor kemampuan ekonomi, kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dinamika kependudukan dan faktor penunjang lainnya.

2.1.1.2. Sumber Daya Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara umum indikator kesehatan masyarakat tercermin melalui usia harapan hidup; tingkat kematian ibu dan anak; status gizi ibu dan anak; jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan; serta jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan.

Usia Harapan Hidup masyarakat Manggarai sangat dipengaruhi variabel jumlah dan jenis penyakit yang diidap masyarakat. Ragam penyakit yang diderita masyarakat Manggarai selain bersifat degeneratif, juga terjadi trend peningkatan pada beberapa jenis penyakit menular seperti **Malaria** baik jenis malaria klinis maupun malaria positif (meningkat dari 19.891 tahun 2005 menjadi 17.970 tahun 2006, 14.371 tahun 2007, 15.792 kasus atau 11,16% tahun 2008 dan 15.954 kasus atau 1,03% tahun 2009); **Diare** (meningkat dari 7.893 kasus tahun 2005 menjadi 6.399 kasus tahun 2006, 6.695 kasus tahun 2007, 9.077 kasus 41,85% tahun 2008 dan menurun menjadi 8.386 kasus atau

8,24% tahun 2009); **Penyakit Saluran Pernapasan Bagian Atas** (meningkat dari 98.333 kasus atau 21,89% tahun 2005 menjadi 112.722 kasus tahun 2006, tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 77.370 kasus atau 45,69% dan meningkat lagi menjadi 84.139 kasus atau 8,75% tahun 2009); **Pneumonia** (dari 1.555 kasus tahun 2005 menurun menjadi 1.442 kasus tahun 2006, 996 kasus tahun 2007, 949 kasus atau 104,43% tahun 2008 dan 876 kasus atau 8,46% tahun 2009 - kendatipun trennya menurun, namun jenis penyakit masih menempati urutan pertama dan penyebab terbanyak kematian dari 10 jenis penyakit terbanyak di Kabupaten Manggarai), **TBC** (meningkat dari 801 kasus tahun 2005 menjadi 1.195 tahun 2006 menjadi 1.493 kasus atau 24,85% tahun 2007 dan menurun menjadi 716 kasus atau 108,38% tahun 2008 dan 130 kasus atau 36,90% tahun 2009); **Gigitan Anjing Tersangka Rabies** (dari 1.098 kasus tahun 2005 menurun menjadi 380 kasus tahun 2006 menjadi 357 kasus tahun 2007 menjadi 365 kasus atau 2,24% tahun 2008 dan 444 kasus atau 21,64% tahun 2009); **Hepatitis** (menurun dari 119 kasus pada tahun 2007 menjadi 32 kasus atau 271,88% tahun 2008 dan 30 kasus atau 6,67% tahun 2009); dan **HIV/AIDS** (dari 3 kasus tahun 2005 menurun menjadi 1 kasus tahun 2006 meningkat menjadi 20 kasus tahun 2007 menurun menjadi 12 kasus atau 500% pada tahun 2008 dan 15 kasus atau 25% tahun 2009).

Tingkat kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Manggarai masih terus terjadi. **Data kematian ibu** (AKI) 2005-2009 menunjukkan suatu kondisi yang tidak stabil atau fluktuatif yakni menurun dari 29 orang atau 442,8 per 100.000 kelahiran hidup (KH) tahun 2005 menjadi 17 orang atau 277,23 per 100.000 KH (70,59%) tahun 2006 dan 10 orang atau 170 per 100.000 KH (70%) tahun 2007 serta meningkat lagi menjadi 13 orang atau 224 per 100.000 KH (30%) tahun 2008 dan 15 orang atau 258,66 per 100.000 KH (15,39%) tahun 2009. Rata-rata AKI tahun 2005-2009 sebesar 274,33 per 100.000 KH. Kurun waktu yang sama **Angka Kematian Bayi** (AKB) menggambarkan kondisi yang sama dengan AKI yaitu suatu kondisi yang fluktuatif yakni menurun dari 133 kasus atau 20,3 per 1.000 KH pada tahun 2005 menjadi 100 kasus atau 16,31 per 1.000 KH (33%) tahun 2006 dan 75 kasus atau 12,75 per 1.000 KH (33%) tahun 2007, serta meningkat lagi menjadi 77 kasus atau 13,32 per 1.000 KH (2,67%) tahun 2008 dan 87 kasus atau 15 per 1.000 KH (12,99%) tahun 2009. Rata-rata AKB tahun 2005-2009 yakni sebesar 15,54 per 1.000 KH. **Angka Kematian Balita** (umur 0 – 5 tahun) menggambarkan kondisi yang fluktuatif yakni dari menurun dari 69 kasus tahun 2005 menjadi 53 kasus (30,19%) tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 66 kasus (24,53%) tahun 2007 serta menurun lagi

menjadi 16 kasus (312,5%) tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 21 kasus (31,25%) tahun 2009.

Status gizi. Persentase balita gizi buruk terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun yakni dari 3,40% tahun 2005 menjadi 2,76% tahun 2006, 1,50% tahun 2007, 0,5% tahun 2008 dan 0,1% tahun 2009 atau dalam kurun waktu 2005-2009 rata-rata persentase penurunan balita gizi buruk sebesar 1,65%; sedangkan **persentase balita gizi kurang** juga mengalami penurunan yakni dari 25,77% tahun 2005 menjadi 20,76% tahun 2006, 12,14% tahun 2007, 10,12% tahun 2008 dan 5,61% tahun 2009 atau dalam kurun waktu 2005-2007 rata-rata penurunan persentase balita gizi kurang sebesar 14,88%. 56,12% Ibu Bersalin mengalami Kurang Energi Protein (KEP).

Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai sangat variatif. Jumlah tenaga kesehatan (medis dan paramedis) tahun 2007 dibanding target nasional Indonesia Sehat 2010 rata-rata terjadi kesenjangan 28,38%. Kesenjangan tertinggi pada ketersediaan tenaga bidan sebesar 65,97% atau setara dengan 196 orang, tenaga Perawat 58,84% atau kekurangan 131 orang, Dokter Umum 33,26% atau setara dengan 99 orang, tenaga Kesehatan Masyarakat 37,59% atau setara dengan 109 orang dan tenaga Sanitasi 28,90% atau setara dengan 109 orang.

Jumlah tenaga kesehatan (medis dan paramedis) tahun 2009 dibanding target nasional Indonesia Sehat 2010 rata-rata terjadi kesenjangan tenaga kesehatan 19,45%. Kecuali tenaga perawat yang telah melampaui yakni 358 dari target Indonesia Sehat 2010 sebesar 349 orang; sedangkan yang lain masih mengalami kesenjangan yakni kesenjangan tertinggi pada ketersediaan tenaga bidan sebesar 51,47% atau setara dengan 160 orang, dokter spesialis 4,58% atau setara dengan 14 orang, dokter umum 33,62% atau setara dengan 101 orang, dokter gigi 8,52% atau setara dengan 26 orang, apoteker 8,58% atau setara dengan 26 orang, tenaga Kesehatan Masyarakat 35,04% atau setara dengan 105 orang dan tenaga Sanitasi 26,54% atau setara dengan 81 orang, tenaga gizi 15,98% atau setara dengan 48 orang.

Pada tataran kebijakan, paradigma kesehatan perlu diubah ke arah preventif-promotif yang jauh lebih efektif dan efisien dibanding tindakan kuratif, karena dari sisi pembiayaan upaya penyehatan melalui strategi preventif dan promotif seperti penyadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, penyediaan air bersih, perbaikan saluran air, perbaikan lingkungan perkampungan dengan pola pemberdayaan masyarakat jauh lebih hemat dan berdampak luas dibandingkan pembiayaan untuk tindakan medik dan

pengobatan. Secara konseptual upaya ini telah mendapat perhatian namun perlu mendapat penguatan pada tataran implementasi.

2.1.1.3. Sumber Daya Kependudukan dan Keluarga Berencana

Salah satu modal pembangunan Indonesia ialah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang besar yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal produktif pada satu sisi dan sekaligus menjadi beban pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya rendah pada sisi lain. Karena itu upaya untuk melahirkan penduduk yang berkualitas sejak dalam kandungan merupakan spirit pembangunan manusia seumur hidup (*long life human development*) dan belajar sepanjang hayat (*long life education*).

Indikator pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana yang berkualitas di Kabupaten Manggarai tercermin melalui dinamika kependudukan seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, karakteristik penduduk serta aspek pendataan penduduk dan penggunaan kontrasepsi.

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2005 sebanyak 499.887 jiwa atau 101.380 KK (laki-laki sebanyak 246.910 jiwa dan perempuan sebanyak 252.177 jiwa), tahun 2006 sebanyak 510.744 jiwa (laki-laki sebanyak 252.182 jiwa dan perempuan sebanyak 258.892 jiwa) atau 108.278 KK, tahun 2007 519.868 jiwa (laki-laki sebanyak 258.704 jiwa dan perempuan sebanyak 261.164 jiwa) atau 112.543 KK, tahun 2008 sebanyak 282.289 jiwa (laki-laki sebanyak 142.081 jiwa dan perempuan sebanyak 140.208 jiwa), tahun 2009 sebanyak 294.863 jiwa (laki-laki sebanyak 145.427 jiwa dan perempuan sebanyak 149.442 jiwa) atau 63.153 KK (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai) dengan rata-rata pertumbuhan (geometrik) tahun 2005-2009 sebesar 1,5% per tahun. Jika rata-rata pertumbuhan ini konstan, maka kemungkinan penduduk Kabupaten Manggarai akan mencapai 2 (dua) kali lipat dari jumlah sekarang (*double population*) pada tahun 2054. Namun berdasarkan efektifitas penggunaan alat kontrasepsi *Total Fertility Rate* (TFR) mengalami penurunan dari 4,25 tahun 2005 (artinya rata-rata setiap perempuan Manggarai usia 15-49 tahun melahirkan anak sebanyak 4 – 5 orang) menjadi 3,69 tahun 2006, tahun 2007 sebesar 3,46 (artinya rata-rata setiap perempuan Manggarai usia 15-49 tahun melahirkan anak sebanyak 3-4 orang) dan TFR tahun 2008 sebesar 3,41 serta tahun 2009 sebesar 3,35 (artinya rata setiap perempuan manggarai usia 15-49 tahun melahirkan anak 3-4 orang). Kondisi ini memberi peluang perubahan

jumlah penduduk Kabupaten Manggarai bisa saja bergerak di luar prediksi di atas jika tidak diimbangi upaya preventif dan promotif bidang kesehatan (khususnya kesehatan reproduksi) dan Keluarga Berencana.

Data karakteristik (usia dan jenis kelamin) penduduk Kabupaten Manggarai menurut perbandingan jenis kelamin menunjukkan bahwa seks ratio masih didominasi oleh perempuan kendatipun trennya menurun yakni dari 99,29% tahun 2007 menjadi 99% tahun 2008 dan 96,66% tahun 2009. Data ini menggambarkan bahwa di antara 100 orang perempuan terdapat 99/99,66 orang laki-laki. Berdasarkan segi komposisi usia, penduduk Kabupaten Manggarai yang berusia 0-14 meningkat dari 42,25% (tahun 2007) menjadi 42,28% (tahun 2008), usia 15-64 tahun menurun dari 54,51% tahun 2007 menjadi 53,03% tahun 2008, dan usia 65+ meningkat dari 3,24% tahun 2007 menjadi 3,69% tahun 2008. Data ini menunjukkan ratio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif tahun 2007 sebesar 88,44%, artinya rata-rata 100 orang penduduk usia produktif menanggung beban 88 orang penduduk usia tidak produktif.

Mengenai data kependudukan di Kabupaten Manggarai, dilakukan secara Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK). Demikian pula ketersediaan tenaga pencacah masih sangat kurang, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pelibatan pengurus wilayah sampai ke tingkat RT juga belum optimal karena berbagai kendala, terutama hambatan pendanaan. Hal ini tercermin dari laporan data kependudukan yang kurang komprehensif, misalnya pendataan tidak dilakukan berdasarkan umur tunggal, sehingga menyulitkan bagi pengguna data untuk kebutuhan spesifik lainnya. Kelemahan pada aspek ketersediaan data penduduk berdampak pada rendahnya kualitas analisis pembangunan yang membutuhkan referensi data kependudukan yang komprehensif.

Dalam kurun waktu tahun 2008 - 2009, pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil tergambar pada beberapa indikator seperti: (i) **Ratio penduduk yang ber-KTP per satuan penduduk** yakni 13,14% atau sebanyak 38.182 jiwa dari 290.528 jiwa (bila dibandingkan antara tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan yakni dari 25.475 jiwa atau 9,14% dengan total penduduk sebanyak 278.773 jiwa menjadi 12.707 atau 4,37% jiwa dari total penduduk sebanyak 290.528 jiwa); (ii) **Ratio Anak/Bayi ber-Akte Kelahiran** yakni 14,99% atau sebanyak 43.573 dari 290.528 jiwa (bila dibandingkan antara tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan yakni dari 36.422 jiwa atau 13,06% dengan total penduduk sebanyak 278.773 jiwa menjadi 7.151 atau 2,46% jiwa dari total

penduduk sebanyak 290.528 jiwa); (iii) **Ratio pasangan ber-Akte Nikah** yakni 3,59% atau sebanyak 2.266 pasang dari 63.153 KK; (iv) **Ketersediaan sistem administrasi kependudukan** yakni SIMDUK; (v) **Ketejangkauan biaya pelayanan administrasi kependudukan** yakni dapat dijangkau oleh masyarakat; (vi) **Lama (waktu) pelayanan administrasi kependudukan** yakni meningkat dari 1-7 hari tahun 2005 menjadi 1-3 hari tahun 2009; (vii) **Tingkat Kemutakhiran data administrasi kependudukan** yakni menurun dari 80% tahun 2008 menjadi 75% tahun 2009; dan (viii) **Tingkat Pertumbuhan Kepemilikan Kartu Penduduk** yakni menurun dari 25.475 jiwa atau 9,14% dengan total penduduk sebanyak 278.773 jiwa tahun 2008 menjadi 12.707 atau 4,37% jiwa dari total penduduk sebanyak 290.528 jiwa tahun 2009.

Perkembangan Keluarga Berencana tahun 2008 di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan, ditandai oleh jumlah akseptor KB aktif yang mencapai 69,41% dari 42.683 PUS, atau meningkat sebesar 9,86% dari tahun 2005 (23.087 PUS). Namun dari sisi kepesertaan laki-laki dalam berKB masih sangat rendah dibanding perempuan. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa dari 20.110 peserta KB aktif hanya terdapat 0,37% (75 orang) laki-laki yang menggunakan alat kontrasepsi. Pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan yang ditandai oleh jumlah akseptor KB aktif yang mencapai 69,57% dari 45.780 PUS atau meningkat sebesar 10,20% dari tahun 2005 (23.087 PUS). Namun dari sisi kepesertaan laki-laki dalam berKB masih sangat rendah dibanding perempuan. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa dari 25.722 peserta KB aktif hanya terdapat 0,37% (75 orang) laki-laki yang menggunakan alat kontrasepsi.

2.1.1.4. Sumber Daya Pendidikan

Rencana pembangunan pendidikan jangka panjang di Kabupaten Manggarai tahun 2005–2025 disusun dengan merujuk pada pola pembangunan pendidikan nasional yang mengarah pada berbagai kebijakan pembangunan pendidikan untuk memenuhi 3 (tiga) hal mendasar yakni: 1) Pemerataan Akses; 2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; serta 3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik.

Searah dengan hal tersebut, rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Manggarai juga mempertimbangkan prinsip universal pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan keragaman budaya dan peningkatan keadilan sosial.

Pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Manggarai dapat ditelusuri melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah, serta Angka Melek Huruf (AMH). Menurut Hasil Survey Pendidikan tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Data base Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Tahun 2009, aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Manggarai digambarkan sebagai berikut:

1. APS usia 7-12 sebesar 93,55% mengindikasikan keberadaan 6,45% penduduk usia 7-12 yang belum/tidak sekolah lagi; sedangkan tahun 2009 meningkat menjadi 94,69% yang mengindikasikan keberadaan 5,31% penduduk usia 7-12 yang belum/tidak sekolah lagi. APS usia 13-15 sebesar 76,77% mengindikasikan keberadaan 23,23% penduduk usia 13-15 yang belum/tidak sekolah lagi; sedangkan tahun 2009 meningkat menjadi 80,03% yang mengindikasikan keberadaan 19,97% penduduk usia 13-15 yang belum/tidak sekolah lagi. APS usia 16-18 sebesar 44,69% mengindikasikan keberadaan 55,31% penduduk usia 16-18 yang belum/tidak sekolah lagi; sedangkan tahun 2009 meningkat menjadi 61,07% yang mengindikasikan keberadaan 38,93% penduduk usia 16-18 yang belum/tidak sekolah lagi.
2. APK jenjang pendidikan **SD** sebesar 115,70% tahun 2005, tahun 2006 121,18%, tahun 2007 sebesar 122,32%, tahun 2008 122,17% dan APM tahun 2006 sebesar 94,64%, tahun 2007 sebesar 92,96%, tahun 2008 sebesar 95,21% menjelaskan keberadaan 12,89% siswa yang sedang sekolah tidak berusia 7-12 tahun; sedangkan tahun 2009 APK sebesar 111,50% dan APM sebesar 94,69% menjelaskan keberadaan 15,71% siswa yang sedang sekolah tidak berusia 7-12 tahun. APK jenjang pendidikan **SMP/MTs** tahun 2005 sebesar 64,56%, tahun 2006 sebesar 67,18%, tahun 2007 sebesar 71,59% tahun 2008 sebesar 96,76% dan APM tahun 2006 sebesar 51,33% menjelaskan keberadaan 15,50% siswa yang sedang sekolah tidak berusia 13-15 tahun, tahun 2007 sebesar 56,585, tahun 2008 sebesar 59,85; sedangkan tahun 2009 APK sebesar 106,47% dan APM sebesar 80,16% menjelaskan keberadaan 37,01% siswa yang sedang sekolah tidak berusia 13-15 tahun. APK jenjang pendidikan **SMA/MA** Tahun 2005 sebesar 43,58%, tahun 2006 sebesar 45,04%, tahun 2007 sebesar 45,12%, tahun 2008 sebesar 77,32 dan APM tahun 2006 sebesar 32,15% menjelaskan keberadaan 11,08% siswa yang sedang sekolah tidak berusia 16-18 tahun; tahun 2007 32.32%, tahun 2008 sebesar 39,32% sedangkan APK tahun 2009

sebesar 88,16% dan APM sebesar 64,03% menjelaskan keberadaan 27,09% siswa yang sedang sekolah tidak berusia 16-18 tahun.

3. Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,43 tahun menjelaskan status pendidikan rata-rata penduduk Kabupaten Manggarai hanya tamatan SD atau kelas 1 SMP. Selain itu data ini juga menggambarkan sukses wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Manggarai baru mencapai 71,45%. Rata-rata lama sekolah penduduk tahun 2009 sebesar 7,20% menjelaskan status pendidikan rata-rata penduduk hanya sampai pada jenjang kelas 7/8 tingkat pendidikan dasar (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai).
4. Angka Buta Huruf penduduk Kabupaten Manggarai usia 15 tahun ke atas sebesar 10,24% mengindikasikan keberadaan penduduk buta aksara sebanyak 28.546 orang dari 278.773 orang penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2008. Angka ini sekaligus menggambarkan pentingnya peran pendidikan luar sekolah, pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan non formal dan perpustakaan daerah.

Mengenai mutu, relevansi pendidikan dan daya saing, kinerja pendidikan di Kabupaten Manggarai mengalami penurunan dan kurang kompetitif dibanding Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Data tingkat kelulusan UAN jenjang SMP tahun 2007/2008 sebesar 62,50% (turun dari 83,74% tahun 2005/2006), lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni 46,36%, namun lebih rendah dari Kabupaten Manggarai Barat yakni 78,74% dan Manggarai Timur 89,59%, serta urutan ke-6 dari 20 kabupaten/kota di NTT. Demikian pula tingkat kelulusan UAN jenjang SMA sebesar 61,25% (turun dari 77,49% tahun 2005/2006), lebih rendah dari rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timuryakni 68,03%, juga lebih rendah dari Kabupaten Manggarai Barat 77,05% dan Manggarai Timur 90,69% serta urutan ke-14 dari 20 kabupaten/kota di NTT.

Selain melalui jalur pendidikan formal di sekolah-sekolah, peningkatan kualitas SDM juga dapat melalui sumber kearsipan dan perpustakaan. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyediakan fasilitas perpustakaan umum dan pembangunan taman baca atau pondok baca di kecamatan-kecamatan dengan buku-buku bacaan dari jenjang pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi. Jumlah judul buku yang tersedia di Perpustakaan Umum Daerah tidak selalu sama dari tahun ke tahun (menurun atau meningkat) yakni 108 judul (2005), 1.060 judul (2006), 958 judul (2007), 807 judul (2008) dan 621 judul (2009); sedangkan yang tersedia di pondok-pondok baca menurun dari 600 eksemplar (2007) menjadi 450 eksemplar (2008) dan meningkat lagi menjadi 568 eksemplar (2009).

Dilihat dari judul buku yang tersedia berdasarkan jenjang pendidikan, tergambar hal-hal sebagai berikut:

- 1) SD: menurun dari 237 judul tahun 2006 menjadi 167 judul tahun 2009;
- 2) SLTP: menurun dari 121 judul tahun 2006 menjadi 101 judul tahun 2009;
- 3) SLTA: menurun dari 165 judul tahun 2006 menjadi 116 judul tahun 2009;
- 4) Perguruan Tinggi/Umum: meningkat dari 108 judul tahun 2005 menjadi 530 judul tahun 2006, 694 judul tahun 2007 dan menurun menjadi 388 judul tahun 2008 dan 237 judul tahun 2009.

Berdasarkan data ini, tampak bahwa ada buku yang hilang dari penyediaan di perpustakaan umum ataupun pondok baca. Hal ini menggambarkan adanya ketidaknyaman ruang perpustakaan atau ketidaktertiban manajemen perpustakaan, baik di perpustakaan umum daerah maupun pondok-pondok baca di kecamatan-kecamatan.

Jumlah pengunjung di perpustakaan umum meningkat dari 15.856 orang pada tahun 2005 menjadi 63.945 orang (303,29% atau 60,66% per tahun) tahun 2009; sedangkan di pondok baca meningkat dari 4.944 tahun 2007 menjadi 24.994 orang (405,54% atau 135,18% per tahun) tahun 2009. Berdasarkan tingkat pendidikan dan masyarakat umum yang mengunjungi perpustakaan, tergambar sebagai berikut :

- 1) SD: meningkat dari 5.006 orang tahun 2005 menjadi 8.047 orang (60,75% atau 12,15% per tahun) tahun 2009;
- 2) SLTP: meningkat dari 1.963 orang tahun 2005 menjadi 10.673 orang (443,71% atau 88,74% per tahun) tahun 2009;
- 3) SLTA: meningkat dari 3.500 orang tahun 2005 menjadi 15.728 orang (349,37% atau 69,87% per tahun) tahun 2009;
- 4) Perguruan Tinggi: meningkat dari 3.184 orang tahun 2005 menjadi 25.234 orang (692,53% atau 138,51% per tahun) tahun 2009;
- 5) Masyarakat Umum: meningkat dari 2.203 orang tahun 2005 menjadi 4.260 orang (93,37% atau 15,68% per tahun) tahun 2009.

Dokumen-dokumen pelaksanaan pemerintahan daerah, baik berupa pelaksanaan pembangunan maupun tata pemerintahan dan aparatur telah dilaksanakan dengan baik dan terencana kendatipun belum dikomputerisasi. Pelayanan informasi kearsipan daerah kepada yang memerlukan jasa kearsipan meningkat dari 1 orang tahun 2005 menjadi 14 orang tahun 2009.

2.1.1.5. Sumber Daya Pemuda dan Olah Raga

Pemuda merupakan aset pembangunan bangsa, terutama dalam bidang ekonomi. Pemuda Manggarai (usia 16-34 tahun) pada tahun 2007 mencapai 29,19% dari total penduduk Kabupaten Manggarai. Lebih dari 90% pemuda tersebut sudah tidak aktif bersekolah lagi. Sebagai aset pembangunan, pemuda pada jenjang usia sekolah (16-24 tahun) perlu didorong menjadi pelajar atau mahasiswa. Terhadap pemuda berusia 25-34 tahun perlu disiapkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan kondisi sosial ekonomi daerah. Sebaliknya, jika mereka ditelantarkan akan menjadi beban pembangunan dan potensial menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Membudayakan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat Manggarai menjadi aspek penting untuk meningkatkan kualitas penduduk Kabupaten Manggarai. Olah raga belum menjadi gerakan massal. Hingga tahun 2009 di Kabupaten Manggarai, jumlah organisasi olah raga sebanyak 16 cabang, jumlah kegiatan olah raga sebanyak 1 cabang dan jumlah klub olah raga sebanyak 36 cabang (meningkat dari 30 cabang tahun 2005). Kecuali cabang olah raga bela diri dan klub bulu tangkis, cabang olah raga lainnya masih bersifat insidental untuk menjawab penyelenggaraan event besar yang diselenggarakan pemerintah. Karena itu kebijakan bidang olah raga yang mampu mendorong kegiatan olah raga sebagai gerakan massal perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan antara lain karena fasilitas olah raga yang sangat terbatas yakni hanya terdapat 1 (satu) buah gedung dan stadion olahraga, fokus pembangunan daerah masih pada peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia, olah raga belum menjanjikan secara ekonomis bagi kelangsungan hidup dan cara pandang bahwa olah raga sebagai selingan atau rekreasi bagi kehidupan.

2.1.1.6. Sumber Daya Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Salah satu fokus dari 8 target Milenium Development Goals (MDGs) ialah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketimpangan gender dalam semua aspek kehidupan manusia demi peningkatan sumber daya dan pembentukan karakter manusia tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan, sehingga secara bersama-sama terlibat secara aktif dalam pembangunan manusia seutuhnya. Secara umum untuk mengetahui kondisi gender, dilihat dari beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Pendekatan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Manggarai pada tataran aplikatif masih bersifat parsial. Marjinalisasi keberadaan perempuan selain terkait budaya patriakal, juga karena dominan pria Manggarai sebagai petani sehingga cenderung mencari istri yang juga bisa bertani untuk membantu sang suami. Bahkan masih ditemukan segelintir warga masyarakat yang mengarahkan anak-anaknya membantu mereka menjadi petani.

Peran sebagian besar perempuan Manggarai di pedesaan sangat luar biasa jika menggunakan indikator beban kerja (*workload*) karena selain bekerjasama dengan suami sebagai petani, juga mengurus rumah tangga. Beban ini akan bertambah berat lagi karena kaum perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kabupaten Manggarai Dalam Angka Tahun 2009 menggambarkan kondisi angkatan kerja perempuan tahun 2008 yakni : (i) Angkatan Kerja sebanyak 116.873 (45,20%) dari 258.583 angkatan kerja; (ii) Bukan angkatan kerja sebanyak 47.432 (77,33%) dari 64.680 bukan angkatan kerja; (iii) Persentasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (TPAK) sebesar 71,13%; (iv) Persentasi terhadap angkatan kerja sebesar 96,30%; dan (v) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,70% sedangkan laki-laki sebesar 1,48%. Selain itu, gambaran tentang pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Manggarai juga dapat dilihat dari beberapa hal, seperti: (i) Jumlah PNS yakni 1.876 (36,33%) dari 5.164 orang (instansi vertikal dan perangkat daerah otonom); (ii) Jumlah perempuan yang menduduki jabatan yakni **jabatan eselonering** : 107 orang (Eseleon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 13 orang dan Eselon IV sebanyak 93 orang) atau 17,54% dari 610 orang dan **jabatan fungsional** : 1412 orang (43,99%) dari 3.210 orang (khusus perangkat daerah otonom); (iii) Tingkat keterwakilan perempuan di legislatif yakni 3 dari 40 orang atau 7,5%; (iv) Jumlah perempuan yang menjadi kepala desa yakni 2 dari 132 orang; Jumlah perempuan yang menjadi Lurah yakni 2 dari 17 orang; (v) Kekerasan perempuan selama tahun 2007, dari 39 kasus kekerasan yang ditangani polisi, 18 korban diantaranya ialah perempuan. Namun patut diduga masih lebih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan (termasuk kekerasan verbal); (vi) Akses perempuan terhadap pendidikan yakni tingkat SD: 24.400 (48,61%) dari 50.200 siswa, tingkat SMP: 6.360 (47,60%) dari 13.360 siswa dan SMA: 3.960 (47,37%) dari 8.360 siswa; (vii) Persentase perempuan 15 tahun ke atas yang buta huruf yakni 10.005 (12,67%) dari 15.849 orang (Hasil Survey Pendidikan tahun 2008 oleh BPS).

2.1.1.7. Sumber Daya Kebudayaan

Kebudayaan Manggarai berhubungan erat dengan keberadaan lembaga adat (*gendang*) dan tanah ulayat (*lingko*); yang dalam terminologi bahasa Manggarai dikenal dengan ungkapan *gendang oné lingko pé'ang*. Otoritas lembaga adat Manggarai mencakup pembagian tanah ulayat, penyelesaian masalah pelanggaran hukum adat, pelaksana ritual adat, dan sebagainya. Pergeseran nilai-nilai adat budaya Manggarai akan cepat terjadi apabila fungsi lembaga adat tidak mampu dipertahankan.

Dalam kurun waktu 2005-2009, tampak beberapa gambaran kondisi kebudayaan Manggarai, seperti:

1. Lembaga adat, sama seperti lembaga ekonomi dan politik lainnya, sangat membutuhkan penguatan (*empowering*). Lembaga adat, yang juga dalam keseharian berlaku sebagai pelaku budaya berfungsi untuk mempertahankan 5 (lima) bingkai lokus utama yang menata ruang budaya kehidupan orang Manggarai yaitu *mbaru bate ka'eng* (rumah sebagai tempat tinggal), *uma bate duat* (kebun sebagai tempat bekerja), *wae bate tek* (sumber mata air), *boa* (lokasi pemakaman)/*compang* (tempat pemujaan leluhur) dan *natas baté labar* (halaman sebagai tempat bermain).
2. Jumlah grup kesenian meningkat dari 16 buah (2008) menjadi 17 buah (2009).
3. Kepatuhan masyarakat terhadap otoritas lembaga adat mulai melemah seiring ketiadaan tanah ulayat yang akan dibagikan kepada masyarakat.
4. Otoritas Lembaga adat sebagai eksekutor pelanggaran hukum adat mulai digantikan oleh hukum positif.
5. Pelaksanaan ritual adat perlahan menjadi pentas seni budaya dan puncak ritual adat yaitu doa adat tampak mulai dilakukan oleh siapa saja yang mampu menghafal doa adat yang banyak tertulis dalam kitab bahasa dan sastra daerah, sehingga terkesan sebagai acara seremonial ketimbang doa ungkapan syukur kepada sang pencipta.

2.1.1.8. Sumber Daya Keagamaan

Kehidupan keagamaan di Kabupaten Manggarai dalam tataran konflik tidak pernah menonjol ke permukaan. Meskipun demikian pembinaan kerukunan antarumat beragama perlu terus dilakukan guna mencegah perbedaan menjadi suatu konflik. Karena itu pembangunan bidang agama dimaksudkan untuk mewujudkan agenda peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dan

kehidupan beragama; dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama melalui peningkatan tenggang rasa dan sikap saling percaya dan harmonisasi antar agama dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalitas dan memahami makna kemajemukan sosial.

Beberapa indikator keagamaan antara lain ialah : (i) **Jumlah agama** di Kabupaten Manggarai sebanyak 4 (empat) buah yakni Katolik, Kristen Protestan, Islam dan Hindu; (ii) **Tempat Ibadah:** Katolik sebanyak 32 paroki dengan 171 gereja; Kristen Protestan sebanyak 4 gereja; Islam sebanyak 24 Masjid; dan Hindu sebanyak 1 Pura; (iii) **Pemeluk agama:** Katolik sebanyak 316.046 umat; Kristen Protetan sebanyak 2.057 umat; Islam sebanyak 26.615 umat; dan Hindu sebanyak 428 umat; (iv) **Jumlah Rohaniwan:** Katolik sebanyak 306 orang; Kristen Protestan sebanyak 3 orang; Islam sebanyak 34 orang; dan Hindu sebanyak 3 orang; (v) **Jumlah Haji:** Hingga tahun 2009, jumlah umat Muslim yang telah menjalan Ibadah Haji sebanyak 91 orang; dan (vi) **Forum kerukunan umat beragama (FKUB).** FKUB sangat berperan untuk menciptakan kerukunan antarumat di Kabupaten Manggarai. Karena perannya yang sangat strategis, maka setiap tahun dilaksanakan kegiatan forum tersebut.

2.1.1.9. Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai sangat kompleks bak lingkaran setan (*vicious cycle*). Identifikasi penyebab persoalan kadang bisa dipandang sebagai akibat dari suatu permasalahan sebelumnya atau dari aspek lainnya. Wujud yang paling menonjol pada bidang kesejahteraan sosial ialah kemiskinan. Kendatipun jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi di Kabupaten Manggarai, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutama pada sektor pertanian, namun secara bertahap jumlahnya semakin berkurang yakni dari 67,79% (39.428 KK miskin dari 58.165 KK) pada tahun 2005 menjadi 62,9% (38.252 KK miskin dari 60.823 KK) pada tahun 2008. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Penyebab masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Penyebab lain masalah kemiskinan adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai akibat dari

kurangnya investasi yang menyentuh sektor pendorong (*push sector*) perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai telah dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan tersebut difasilitasi oleh pemerintah melalui pelbagai program dan kegiatan pembangunan yang berkarakter pemberdayaan atau padat karya. Efektivitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- 1) Tingkat keberdayaan masyarakat pedesaan kurun waktu 2005-2009 tergambar melalui program dan kegiatan: (i) BLM untuk kegiatan sarana dan prasarana pedesaan seperti Telford sepanjang 280.170,8m atau rata-rata 56.034,16m per tahun, Jalan Setapak sepanjang 1.823 atau rata-rata 364,6 per tahun, Driff sebanyak 7 unit, Perpipaian sepanjang 111.160 km atau 22.232 km per tahun, Penampung air hujan sebanyak 6 unit, polindes sebanyak 10 unit, TRK sebanyak 20 unit, MCK sebanyak 47 unit, Saluran Air Bersih sebanyak 5 unit dan sebagainya; (ii) BLM untuk kegiatan Pendidikan seperti pengadaan meubeler untuk SD dan SMP sebanyak 1.368 paket, Insetif Guru Komite sebanyak 231 orang, Beasiswa murid SD/SMP sebanyak 7.359 orang, Transpor bagi siswa SD/SMP sebanyak 2.356 orang, Pengadaan Akte Kelahiran sebanyak 212 orang, pengadaan pakaian seragam sebanyak 56 siswa dan sebagainya; (iii) BLM untuk kegiatan Kesehatan seperti : PMT bagi Bayi, Balita dan Bumil sebanyak 26.544 orang, Transpor bagi Bayi, Balita dan Bumil sebanyak 1.198 orang, biaya persalinan Bumil/Nifas sebanyak 1.603 orang, pelayanan posyandu sebanyak 1.632 orang, pemeriksaan balita sebanyak 212 orang, PMT gizi kurang/buruk sebanyak 1.881 orang dan sebagainya; (iv) Pembentukan Desa Siaga sebanyak 58 desa; (v) Pemugaran perumahan dan lingkungan desa secara terpadu (P2LDT) sebanyak 87 buah di 8 desa.
- 2) Tingkat perkembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, tergambar pada berapa hal berikut seperti (i) Simpan Pinjam Khusus Perempuan: 870 kelompok; (ii) Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 377 kelompok; (iii) Lembaga Perkreditan Desa/Kelurahan (LPD/K): 157 desa; (iv) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K): 60 desa; (v) LPD dari bantuan ADD/K: 149 Desa/Kelurahan; dan (vi) Pelatihan Briket Bio Arang Tempurung Kemiri: 6 desa.
- 3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, tampak dalam beberapa kegiatan antara lain: (i) Musyawarah Desa (Musdes) PNPM-GSC dan PNPM-MP:

meningkat dari 2.463 orang tahun 2008 menjadi 13.228 orang tahun 2009; (ii) Musyawarah Dusun (Musdun) PNPM-GSC dan PNPM-MP: meningkat dari 6.645 orang tahun 2008 menjadi 16.321 orang tahun 2009; (iii) Penilaian Lomba Desa / Kelurahan dan 10 Program Pokok PKK/P2W-KSS.

- 4) Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan pedesaan, tergambar dalam beberapa kegiatan, seperti: (i) Musyawarah Khusus Perempuan yakni melalui pembentukan kelompok perempuan yang telah mencapai 870 buah tahun 2009; (ii) Pembinaan Paket usaha PKK dalam bentuk UBSP, Kios, usaha sayur mayur, kerajinan tangan dan lain-lain sebanyak 30 kelompok (6 kelompok per tahun); (iii) Pembinaan Paket usaha Perempuan (Janda) dalam bentuk UBSP, Kios, usaha sayur mayur, kerajinan tangan dan lain-lain sebanyak 16 kelompok dalam tahun 2008-2009 (8 kelompok per tahun).
- 5) Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yakni 33 kelompok pada tahun 2009
- 6) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK yakni sebanyak 37.396 kelompok atau rata-rata 7.479,2 kelompok per tahun.

Wujud lain permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai berkaitan dengan keberadaan **anak terlantar** (tahun 2005 berjumlah 1.775 orang; tahun 2006–2008 berjumlah 2.020 orang), **lanjut usia** (tahun 2005 berjumlah 1.777 orang; tahun 2006–2008 berjumlah 3.149 orang), **anak cacat** (tahun 2005 berjumlah 13.256 orang; tahun 2006–2008 berjumlah 1.859 orang), tuna sosial, anak jalanan, gangguan bencana alam dan bencana sosial lainnya. Masalah ini merupakan persoalan yang perlu dipecahkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini perlu untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas, runtuhnya ketahanan sosial masyarakat, konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di desa dan kawasan adat terpencil.

2.1.1.10. Sumber Daya Politik

Pemilihan anggota legislatif dan Suksesi Kepala Daerah selama ini mencerminkan iklim politik yang cukup kondusif. Peran lembaga politik untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat sangat ditentukan figur wakil partai politik di lembaga legislatif. Pada sisi lain, dinamika proses politik sangat dipengaruhi kejelasan peraturan perundangan politik. Pada tahun 2009 terjadi sedikit gejolak politik pada pemilihan anggota legislatif sebagai akibat

perbedaan penafsiran terhadap undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Selain itu, masih terdapat surat suara yang rusak atau keliru coblos karena kurang dilakukannya sosialisasi teknis pelaksanaan pemilihan. Mengenai partisipasi politik di Kabupaten Manggarai, tergambar pada beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) **Data Pemilihan Presiden:** Jumlah pemilih pada tahun 2004 sebanyak 275.420 orang (perempuan sebanyak 141.333 orang (51,36%) dan pemilih laki-laki sebanyak 131.215 orang (48,64%)). Dari total tersebut, terdapat 46.491 wajib pilih (16,88%) yang tidak menggunakan hak pilih. Pada tahun 2009, jumlah pemilih sebanyak 166.541 orang. (perempuan sebanyak 87.107 orang (52,30%) dan pemilih laki-laki sebanyak 179.434 orang (47,70%)). Dari total tersebut, terdapat 38.694 wajib pilih (23,23%) yang tidak menggunakan hak pilih.
- 2) **Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2005:** Jumlah pemilih sebanyak 278.931 orang. Dari total tersebut, jumlah pemilih perempuan sebanyak 144.768 orang (51,90%) dan pemilih laki-laki sebanyak 134.163 orang (48,10%); sedangkan terdapat 32.079 wajib pilih (11,50%) yang tidak menggunakan hak pilih.
- 3) **Pemilihan Gubernur NTT Tahun 2008:** Jumlah Pemilih sebanyak 154.510 orang. Dari total tersebut, jumlah pemilih perempuan sebanyak 82.695 orang (53,52%) dan pemilih laki-laki sebanyak 71.815 orang (46,48%); sedang terdapat 30.000 wajib pilih (19,42%) yang tidak menggunakan hak pilih.
- 4) **Pemilihan Legislatif Tahun 2009:** Jumlah pemilih sebanyak 160.545 orang. Dari total tersebut, jumlah pemilih perempuan sebanyak 84.145 orang (52,41%) dan pemilih laki-laki sebanyak 76.400 orang (47,59%); sedangkan terdapat 28.924 wajib pilih (18,02%) yang tidak menggunakan hak pilih.
- 5) **Partai Politik:** meningkat dari 24 buah pada tahun 2004 menjadi 37 buah pada tahun 2009; sedangkan yang memperoleh kursi di lembaga legislatif, meningkat dari 13 buah tahun 2004 menjadi 18 buah tahun 2009.

2.1.1.11. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Secara umum gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manggarai saat ini masih dalam tingkat terkendali; kendatipun pada tahun 2005 pernah menduduki peringkat 1 (satu) rawan keamanan dan ketertiban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan peringkat 10 (sepuluh) untuk nasional. Beberapa jenis gangguan keamanan dan ketertiban sosial yang sering terjadi, tergambar pada beberapa indikator seperti:

- 1) Indeks kriminalitas atau tingkat kriminalitas: Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai mengungkapkan indeks kriminalitas atau tingkat kriminalitas pada tahun 2008 meningkat menjadi 323 kasus (35,60%) dari 208 kasus tahun 2007; sedangkan pada tahun 2009 menurun menjadi 219 kasus (32,20%). Sementara itu, Kepolisian Resort Manggarai melaporkan bahwa jumlah kasus kriminal yang dilaporkan menurun dari 28 kasus tahun 2006 menjadi 24 kasus tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 25 kasus tahun 2008. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas tidak terlepas dari sikap pro aktif dan tindakan tegas aparat penegak hukum dan efek publikasi yang cukup meluas terhadap kasus tersebut.
- 2) Jumlah kasus kriminalitas yang diselesaikan. Dari total kasus kriminalitas yang tergambar pada point 1 di atas, jumlah kasus yang ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai yakni sebesar 80% (166 kasus tahun 2007, 258 kasus tahun 2008 dan 175 kasus tahun 2009).
- 3) Jumlah konflik etnis dan sosial: meningkat dari 7 kasus tahun 2008 menjadi 12 kasus tahun 2009; sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, tergambar fluktuatif yakni 12 kasus (2005), 8 kasus (2006) dan 10 kasus (2007). Konflik etnis dan sosial ini lebih berkaitan dengan persoalan tanah.

Berbagai gangguan keamanan yang belum diimbangi dengan penuntasan masalah penegakan hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Akibatnya ialah pudarnya rasa aman masyarakat.

2.1.1.12. Pembinaan Hukum dan HAM

Persoalan hukum yang paling menonjol dan bersifat massal di Kabupaten Manggarai ialah saling klaim kepemilikan antar-berbagai pihak terhadap kawasan hutan, tanah ulayat dan penyerobotan tanah individu masih terus berlangsung dari waktu ke waktu. Indikator hukum dan HAM mencakupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konflik pertanahan. Jumlah konflik yang berkaitan dengan masalah tanah masyarakat, pemerintah dan kelompok meningkat dari 17 kasus tahun 2008 menjadi 30 kasus tahun 2009; sedangkan kasus yang tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebanyak 94 kasus. Penyelesaian konflik pertanahan, di samping melalui jalur hukum juga diselesaikan melalui pendekatan sosial budaya dan kekeluargaan.
- 2) Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan atas pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Inspektorat Kabupaten

Manggarai menggambarkan bahwa terjadinya penurunan penyimpangan atas pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dalam 3 tahun terakhir yakni dari 371 kasus tahun 2007 menjadi 259 kasus tahun 2008 dan 133 kasus tahun 2009.

- 3) Jumlah Peraturan Daerah yang disusun: meningkat dari 10 buah pada tahun 2005 menjadi 57 buah (82,46% atau 16,49%) pada tahun 2009.
- 4) Jumlah Peraturan Bupati : meningkat dari 14 buah pada tahun 2005 menjadi 114 buah (87,72% atau 17,54% per tahun) tahun 2009.
- 5) Jumlah Keputusan Bupati: meningkat dari 213 buah tahun 2005 menjadi 1.571 buah (86,44% atau 17,29% per tahun) tahun 2009.
- 6) Jumlah Desa penyuluhan hukum: meningkat dari 6 desa tahun 2005 menjadi 77 desa (92,21% atau 18,44% per tahun) tahun 2009.
- 7) Ratio Polisi Pamong Praja dan Penduduk: meningkat dari 58 : 10.000 penduduk tahun 2005 menjadi 50 : 10.000 penduduk tahun 2009.
- 8) Tingkat pelanggaran terhadap hukum positif. Kepolisian Resort Manggarai dan Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai mengungkapkan beberapa jenis pelanggaran hukum positif seperti:
 - a) Kasus Pencurian: meningkat dari 28 kasus tahun 2006 menjadi 52 kasus tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 81 kasus tahun 2008; sedangkan yang diselesaikan pada tahun 2006 sebanyak 20 kasus, tahun 2007 sebanyak 21 kasus dan tahun 2008 sebanyak 21 kasus;
 - b) Kasus Penganiayaan: meningkat dari 57 kasus tahun 2006 menjadi 80 tahun 2007 dan 82 tahun 2008;
 - c) Kasus Pemerkosaan: meningkat dari 6 kasus tahun 2006 menjadi 7 kasus tahun 2007 dan 8 kasus tahun 2008;
 - d) Kasus Perzinahan: meningkat dari 3 kasus tahun 2006 menjadi 4 kasus tahun 2007 dan 8 kasus tahun 2008;
 - e) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : meningkat dari 5 kasus tahun 2006 menjadi 20 kasus tahun 2007 dan menurun menjadi 19 kasus tahun 2008;
 - f) Kasus Perjudian: meningkat dari 6 kasus tahun 2006 menjadi 22 kasus tahun 2007 dan menurun menjadi 13 kasus tahun 2008;
 - g) Kasus Penipuan: meningkat dari 16 kasus tahun 2007 menjadi 21 kasus tahun 2008
 - h) Kasus Penyerobotan: meningkat dari 13 kasus tahun 2006 menjadi 26 kasus tahun 2007 dan menurun menjadi 11 kasus tahun 2008;

- i) *Illegal Logging*: terdapat 2 kasus pada tahun 2008;
- j) Kasus Penggelapan: meningkat dari 8 kasus 2006 menjadi 16 kasus tahun 2007 dan menurun lagi menjadi 11 kasus tahun 2008;
- k) Kasus Penipuan: meningkat dari 9 kasus tahun 2006 menjadi 22 kasus tahun 2007 dan 26 kasus tahun 2008; dan
- l) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ditemukan satu kasus pada tahun 2008

Penyelesaian kasus-kasus tersebut di atas, terutama kasus yang berkaitan dengan klaim kepemilikan belum diselesaikan secara komprehensif. Secara vertikal, penyelesaian masalah tersebut perlu memperhatikan semua kerangka regulasi yang pernah ditetapkan pemerintah mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten. Secara horisontal, sub sistem hukum tidak tertulis (kebiasaan dan hukum adat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan sistem hukum nasional untuk menyelesaikan berbagai masalah sengketa dan klaim kepemilikan kawasan hutan, tanah ulayat dan hak-hak individu. Selain itu terjadi pula jenis pelanggaran hukum berupa: pelanggaran hukum positif seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perjudian dan pelanggaran susila.

2.1.1.13. Tata Pemerintahan dan Aparatur (*Good Governance*)

Good governance mencakupi aspek transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk mewujudkan aspek-aspek *good governance*, juga ditentukan prinsip-prinsip yang harus diaplikasikan dalam pelaksanaannya yakni akuntabilitas, transparansi, responsif, profesionalitas, etika, HAM, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), serta membuka ruang partisipasi masyarakat (*participation*). Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Restrukturisasi kelembagaan sesuai prinsip efektifitas dan efisiensi telah dilakukan tahun 2007. Kendatipun demikian, masih perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap kelembagaan yang telah terbentuk tersebut sebagai bahan kajian revisi lanjutan. Demikian pula transparansi penyelenggaraan pemerintahan masih perlu diimplementasikan melalui

penetapan standar pelayanan minimal terhadap sektor pelayanan publik. Selain itu, kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme perlu diberantas tuntas melalui pengawasan internal, tidak harus menunggu laporan masyarakat atau lembaga pengawasan eksternal.

Demikian pula profesionalitas dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah masih belum memadai. Hal ini tercermin pada kualitas layanan aparatur dan lembaga pemerintah sebagai *public servant*. Berbagai keluhan tentang rendahnya mutu layanan prima pemerintah dan inefisiensi pemanfaatan sarana dan sikap diskriminasi layanan masih mencoraki pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah ini. Selain itu, tata pemerintahan dan aparatur masih dihantui oleh rendahnya kualitas sumber daya aparatur; yang tercermin pada beberapa indikator berikut ini (keadaan tahun 2009) :

- 1) Jumlah PNS di Kabupaten Manggarai: Pegawai daerah otonom sebanyak 5.164 orang (laki-laki sebanyak 3.288 dan perempuan 1.876 orang) dan pegawai pada instansi vertikal sebanyak 424 orang.
- 2) Tingkat Kapasitas sumber daya aparatur didominasi oleh yang berpendidikan SD sampai SMA yakni 2.630 orang; sedangkan yang berpendidikan setara S3: 1 orang, S2 (termasuk dokter): 42 orang, S1: 1.068, Sarjana Muda/D3: 625 orang , D2: 627 orang, dan D1: 171 orang.
- 3) Tingkat ketrampilan aparatur yakni PNS yang mengikuti diklat struktural (PIM II sebanyak 11 orang, PIM III sebanyak 38 orang dan PIM IV sebanyak 190 orang) dan diklat prajabatan (CPNSD Gol. III: 363 orang dan Gol. II: 1.290 orang).
- 4) Tingkat Profesionalitas berdasarkan diklat teknis berupa TOT, BIMTEK, WORKSHOP dan RAKOR yakni Diklat teknis di luar daerah sebanyak 215 orang dan Diklat Teknis Dalam Daerah (diklat akuntansi keuangan daerah sebanyak 80 orang, diklat pengadaan barang dan jasa sebanyak 200 orang dan diklat karya tulis ilmiah sebanyak 170 orang).

Persoalan lain yang menghantui pengelolaan tata pemerintahan dan apratur ialah sebagian besar SKPD belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.1.2. Bidang Ekonomi

Sebagai suatu sistem perekonomian terbuka, perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Manggarai tidak hanya ditentukan oleh dinamika internal perekonomian masyarakat Manggarai, tetapi juga oleh pergerakan perekonomian global, nasional dan Provinsi NTT. Besarnya pengaruh berbagai faktor eksternal tersebut terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai disebabkan oleh lancarnya arus barang, jasa,

informasi dan modal; yang memungkinkan peningkatan transaksi ekonomi antar pulau dan antar-negara (regionalisasi dan globalisasi). Selain itu berbagai dampak positif dari regionalisasi dan globalisasi, juga harus diakui adanya dampak negatif dalam berbagai bentuk, seperti efek menular krisis ekonomi global dan nasional terhadap kondisi perekonomian daerah.

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pergerakan perekonomian Kabupaten Manggarai dalam 10 tahun terakhir yakni:

- a. Krisis ekonomi Indonesia yang dipicu oleh krisis moneter pada tahun 1997-1998. Krisis ekonomi tersebut mengakibatkan turunnya daya beli sebagai dampak dari pengangguran yang meningkat, yang pada akhirnya mengakibatkan perekonomian nasional dan Provinsi NTT mengalami pertumbuhan negatif.
- b. Krisis ekonomi tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa daya tahan perekonomian masyarakat Manggarai yang masih sangat tergantung pada sektor primer, terutama sektor pertanian. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai pada tahun 1999 masih bertumbuh 1,8%, sementara perekonomian Indonesia dan Provinsi NTT mengalami pertumbuhan masing-masing -16% dan -2,73%.
- c. Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 telah memicu krisis politik, yang berujung pada pergantian Regim Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Salah satu dampak penting dari pergantian Regim Pemerintahan ini ialah penerapan Kebijakan Desentralisasi/Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan politik, administrasi dan fiskal yang lebih besar kepada Kabupaten/Kota.
- d. Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan manfaat langsung bagi perkembangan ekonomi daerah dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah. Sebagai contoh, total pendapatan daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 1998 masih berjumlah Rp. 52.887.462.000,-; sedangkan tahun 2008 berjumlah Rp. 527.715.591.198,-
- e. Peningkatan total pendapatan daerah tersebut diikuti oleh perubahan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, yang pada tahun 1998 hanya menyumbang 0,004%, dan pada tahun 2008 telah menyumbangkan 3,3% terhadap Total APBD. Pada sisi lain, peran Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan di daerah juga terlihat masih sangat penting, yang terlihat dari Kontribusi Dana Bagi/Hasil Pajak serta Sumbangan/Bantuan. Jika pada tahun 1998 pos-pos penerimaan tersebut, memberikan kontribusi sebesar 94%, maka pada tahun 2008 menurun menjadi 89%.

- f. Dampak penting lain dari penerapan kebijakan otonomi daerah ialah terbukanya kemungkinan pemekaran kabupaten/kota dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. DPRD Kabupaten Manggarai pada tahun 2000 telah merekomendasikan pemekaran Kabupaten Manggarai menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai (sebagai *Kabupaten Induk*), Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Sebagai tindak lanjut keputusan politik tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengajukan usulan pemekaran tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi NTT. Hasilnya ialah Pemerintah Pusat mengesahkan pembentukan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2003 dan Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2007.
- g. Keputusan politik berkenaan dengan pembentukan Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur memiliki dampak terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Manggarai secara keseluruhan. Berkurangnya potensi perekonomian mengakibatkan turunnya kontribusi Sektor Pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai. Sebagai contoh, pembentukan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur telah mengakibatkan turunnya kontribusi Sektor Primer dari 55,7% tahun 2002 menjadi 40,55% tahun 2008.
- h. Turunnya kontribusi sektor pertanian karena meningkatnya kontribusi sektor tersier. Perubahan-perubahan tersebut antara lain ditunjukkan oleh perubahan curah hujan dan berkurangnya debit air bagi irigasi pertanian, yang antara lain dikarenakan oleh praktek-praktek penebangan liar dalam kawasan hutan di Manggarai.
- i. Keikutsertaan Pemerintah RI dalam penandatanganan kesepakatan negara-negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) telah mendorong Pemerintah Daerah juga mengadopsi tujuan-tujuan pembangunan milenium sebagai salah satu tujuan pembangunan daerah.
- j. Fluktuasi harga minyak Internasional dalam 10 tahun terakhir mengakibatkan ketidakpastian penerimaan Pemerintah RI, yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakpastian dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Pada tahun anggaran 2008 yang lalu, Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalami penurunan sebagai akibat dari pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10% dari yang semula direncanakan.
- k. Melemahnya kinerja perekonomian nasional sebagai dampak dari Krisis Ekonomi Global yang mulai terjadi pada akhir tahun 2008. Hal ini mengakibatkan Pemerintah RI

harus meningkatkan Belanja Pemerintah untuk merangsang perputaran roda perekonomian melalui kucuran dana stimulus yang disalurkan antara lain melalui Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2009.

2.1.2.1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai pra-pemekaran memperlihatkan bahwa kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB **masih mendominasi** dari pada kontribusi sektor sekunder dan tersier. Tahun 2002, sumbangan sektor primer sebesar 55,7% dan sektor tersier menyumbang sebesar 35,5%. Kondisi ini berbalik pada tahun 2008, yaitu kontribusi sektor primer turun menjadi sebesar 43% sedangkan kontribusi sektor tersier meningkat menjadi 47,3%. Bersamaan dengan itu, kontribusi sektor sekunder tidak mengalami perubahan secara signifikan, karena hanya memberikan kontribusi antara 8% sampai 10% dari Total PDRB, baik sebelum maupun setelah kebijakan pemekaran kabupaten.

2.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu tahun 1994-2006 dibagi atas 2 periode, yaitu pertama tahun 1994-2000 dan kedua tahun 2001-2006. Pertumbuhan ekonomi pada periode pertama menunjukkan trend yang terus menurun dari 11,73% pada tahun 1994 dan terus menurun hingga 1,43% pada tahun 2000.

Penyebab utama penurunan ini antara lain: (1) terjadinya krisis ekonomi 1998 masih tercatat 1,81%. Hal ini menunjukkan kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi pada tahun yang sama (-2,37%); 2) Menurunnya anggaran pemerintah karena perubahan tahun anggaran yang semula dimulai dari 1 April–31 Maret berubah menjadi 1 Januari hingga 31 Desember.

Terdapat 2 (dua) catatan penting dalam periode pertama ini. Pertama, meskipun terus mengalami penurunan pertumbuhan, namun perkenomian pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998 masih tercatat 1,81%. Hal ini merupakan hal yang positif jika dibandingkan dengan pertumbuhan negatif (-2,73%) pada level Provinsi NTT. Pertumbuhan positif ini setidaknya dapat ditelusuri dari kontribusi sektor pertanian (terutama sub-sektor perkebunan) yang relatif tinggi dalam struktur ekonomi Kabupaten Manggarai. Kedua, setelah bertumbuh 3,37% pada tahun 1999, perekonomian kembali mengalami penurunan pertumbuhan menjadi hanya sebesar 1,43% pada tahun 2000.

Penyebab utama penurunan pertumbuhan ini antara lain ialah karena menurunnya belanja pemerintah yang disebabkan oleh berkurangnya nilai APBD sebagai konsekuensi dari perubahan awal Tahun Anggaran dari 1 April menjadi 1 Januari.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada periode kedua (2000-2006) ditandai oleh peningkatan pertumbuhan yang sangat signifikan dari 1,43% pada tahun 2000 meningkat menjadi 7,30% pada tahun 2002. Namun, pertumbuhan ini kembali menurun menjadi 5,64% pada tahun 2003, hal ini disebabkan oleh pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. Pembentukan kabupaten baru ini berakibat pada menurunnya berbagai potensi dan aktivitas perekonomian yang sebelumnya tercatat dalam perekonomian Kabupaten Manggarai.

2.1.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita

Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi antara 4%-6% per tahun, pendapatan per kapita masyarakat Manggarai terlihat masih terus mengalami peningkatan yakni dari Rp. 1.749.852 pada tahun 2003 menjadi Rp. 2.746.818 pada tahun 2008 atau naik sebesar 56,96% atau rata-rata 11,40% per tahun. Mengingat bahwa nilai tersebut merupakan rata-rata, maka dapat diperkirakan peningkatan pendapatan per kapita tersebut lebih banyak dialami oleh masyarakat yang bekerja pada sektor tersier.

Meskipun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai masih berada di bawah pendapatan per kapita Provinsi NTT yakni dari Rp. 2.626.180 (2003) menjadi Rp. 4.469.639 (2008) atau naik sebesar 61,05% atau rata-rata 12,21% per tahun. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT pada tahun 2008, maka pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai yang bertumbuh sebesar 10,4% pada tahun 2008 terlihat jauh lebih baik dari pada pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata NTT yang hanya 4,6%. Dalam kondisi demikian diperkirakan terdapat 63,9% penduduk miskin pada tahun 2008 di Kabupaten Manggarai. Kecenderungan melebarinya kesenjangan pendapatan akan berdampak pada makin lambatnya upaya penanggulangan kemiskinan yang semata-mata mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.4. Tingkat Kemiskinan

Salah satu point dari 8 target MDGs ialah menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Kemiskinan dan kelaparan harus diatasi karena berkaitan dengan citra diri

manusia yang memiliki harkat dan martabat untuk hidup sebagaimana layaknya. Pada sisi lain, problem kemiskinan bersifat multidimensi karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan juga berkaitan dengan kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Dengan demikian, kemiskinan berkaitan dengan kegagalan dalam pemenuhan hak dasar warga Negara dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Pertumbuhan ekonomi antara 4%-6% berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Hal ini terlihat dari menurunnya persentasi KK Miskin di Kabupaten Manggarai dari 67,8% tahun 2005 menjadi 63,9% tahun 2008. Meskipun demikian, persentasi KK Miskin tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata persentasi KK Miskin Provinsi NTT sebesar 56,75% yang antara lain disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan struktur pasar input dan output pertanian yang menjadi andalan pendapatan masyarakat Manggarai.

Berkaitan dengan distribusi penduduk miskin, terlihat bahwa hanya 2 (dua) kecamatan, yaitu Langke Rembong dan Satar Mese, yang tercatat memiliki persentasi penduduk miskin di bawah rata-rata Kabupaten Manggarai (masing-masing sebesar 43,6% dan 58,6%); sedangkan kecamatan-kecamatan lain mencatat persentasi Rumah Tangga Miskin yang masih berada di atas rata-rata Kabupaten Manggarai. Ketidakseimbangan distribusi penduduk miskin inilah yang antara lain menjadi petunjuk masih adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Manggarai.

2.1.2.5. Sumber Daya Pertanian (Sektor Primer)

2.1.2.5.1. Sumber Daya Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada Sektor Primer, sumbangan terbesar diberikan Sub-Sektor Pertanian Tanaman Pangan, baik yang berasal dari tanaman padi dan palawija maupun tanaman hortikultura.

Tanaman Pangan:

Dalam kurun waktu 2005-2009, telah terjadi penurunan total areal tanam rata-rata 4,8% per tahun dari 37.429 Ha pada tahun 2005 menjadi 30.824 pada tahun 2009. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada periode kedua (2000-2006) ditandai oleh peningkatan pertumbuhan yang sangat signifikan dari 1,43% pada tahun 2000 meningkat menjadi 7,30% pada tahun 2002. Namun, pertumbuhan ini kembali menurun menjadi 5,64% pada tahun 2003, hal ini disebabkan oleh pembentukan Kabupaten Manggarai

Barat. Pembentukan kabupaten baru tersebut mengakibatkan menurunnya berbagai aktivitas ekonomi. Pembentukan kabupaten baru ini berakibat pada menurunnya berbagai potensi dan aktivitas perekonomian yang sebelumnya tercatat dalam perekonomian Kabupaten Manggarai.

Meskipun berkurang dari sisi luas areal tanam, namun total produksi padi meningkat sangat signifikan, yakni rata-rata sebesar 10,6% per tahun dari 42.875 ton pada tahun 2005 menjadi 56.046 ton pada tahun 2009. Hal yang sama juga terjadi pada komoditi jagung yang meningkat dari 11.204 ton pada tahun 2005 menjadi 22.614 ton pada tahun 2009. Peningkatan produksi inilah yang menggambarkan peningkatan produktivitas padi dari 4,27 ton/ha tahun 2005 menjadi 5,10 ton/ha tahun 2009 serta peningkatan produktivitas jagung dari 2,5 ton/ha (2005) menjadi 4,5 ton/ha tahun 2009.

Peningkatan produksi dan produktivitas pada tanaman padi dan jagung tersebut antara lain karena beberapa hal berikut:

- a) Penggunaan benih unggul dan pemupukan berimbang yang telah mencakup 91% dari luas areal tanam padi dan 47% dari luas areal tanam jagung;
- b) Penerapan mekanisasi pertanian dalam pengolahan tanah dan penanganan pasca panen juga berkontribusi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, meski luas areal tanam Padi dan Palawija yang menerapkan mekanisasi pertanian masih sangat rendah yaitu hanya 1,55% dari total areal tanam;
- c) Adanya peningkatan jumlah kelompok/petani penangkar padi dari 2 kelompok pada tahun 2005 menjadi 5 kelompok pada tahun 2009; walaupun kelompok/petani penangkar jagung yang produksinya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, keberadaan Balai Benih Palawija yang sebenarnya sangat penting dalam pembangunan pertanian juga belum tersedia.

Hortikultura:

Pada kelompok sayur-sayuran, peningkatan produksi terdapat pada tanaman sawi, wortel, buncis dan kangkung; sedangkan pada tanaman lain, telah terjadi penurunan produksi yang sangat drastis. Pada kelompok buah-buahan dan biofarmaka, terjadi peningkatan produksi yang menggembirakan dan dapat menjadi potensi ekspor maupun perdagangan antar kabupaten dan antar pulau. Berbagai persoalan dalam pengembangan tanaman hortikultura antara lain karena tidak tersedianya balai benih hortikultura yang dapat menyediakan benih berkualitas serta ketiadaan kelompok/petani penangkar tanaman

hortikultura yang berperan penting dalam penyediaan benih standar sesuai dengan karakteristik alam di Kabupaten Manggarai.

Aspek Kelembagaan:

Dalam hal kelembagaan kelompok tani, telah terjadi peningkatan dari 566 pada tahun 2005 menjadi 905 kelompok tani pada tahun 2009. Peningkatan terjadi pada semua kelas kelompok tani, yakni **Kelas Pemula** (dari 435 menjadi 595 kelompok), **Kelas Lanjut** (dari 131 menjadi 293 Kelompok), dan **Kelas Madya** (dari 9 menjadi 17 kelompok). Kelompok-kelompok tani tersebut menjadi target pelatihan budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Selain itu, kelompok-kelompok tani inilah yang menjadi penerima kredit usaha pertanian dan peningkatan permodalan petani, yang pada tahun 2009 dilaksanakan dalam beberapa bentuk : i) Kegiatan Lumbung Pangan (9 kelompok); ii) Kelompok Wanita Tani (13 Kelompok); (iii) Kelompok *Home Industry* Pangan (6 Kelompok); (iv) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (5 kelompok); dan (v) Program Usaha Agribisnis Pedesaan (35 Kelompok).

Aspek Penyuluhan:

Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian. Hal ini terlihat adanya peningkatan dari 99 orang pada tahun 2005 menjadi 143 orang pada tahun 2009 yang terdiri dari 4 orang kelompok fungsional sebagai pembina pada tingkat Kabupaten, 9 orang Kepala BPP, 22 orang penyuluh pertanian urusan program (PPUP) sebagai supervisor tingkat BPP, 108 orang PPL yang bertugas di desa. Dari total 149 Desa/Kelurahan, sisa 41 desa/kelurahan belum ada tenaga PPL.

Ketersediaan dan Konsumsi:

Tingkat konsumsi energi masyarakat Manggarai pada tahun 2008 telah mencapai 2.200,40 Kkal/hari. Ini berarti tingkat konsumsi energi di masyarakat Manggarai telah melampaui persyaratan minimal yang ditentukan untuk dapat bertahan hidup secara sehat, yaitu sebesar 2.200 Kkal/hari. Konsumsi energi sebesar 2.200,40 Kkal/hari ini juga telah dapat terpenuhi karena tingkat ketersediaan energi yang mencapai 2.638,04 Kkal/hari.

Meski demikian, perlu diperhatikan keseimbangan tingkat konsumsi energi yang hampir 70% didominasi oleh makanan yang mengandung karbohidrat (padi-padian dan

ubi-ubian); sedangkan konsumsi makanan yang mengandung protein dan vitamin lainnya masih kurang dari 10%.

2.1.2.5.2. Sumber Daya Perkebunan

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2005-2007 rata-rata sebesar 9,8% dari total PDRB. Jumlah ini tentu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kontribusi subsektor Tanaman Pangan. Pada sisi lain meski tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB seperti sub sektor Pertanian Tanaman Pangan, namun peran sub sektor Perkebunan di Kabupaten Manggarai cukup strategis dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, karena produk Perkebunan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional dan global, seperti Kopi, Kakao, Vanili, Jambu Mete, Cengkeh dan Kemiri. Komoditi-komoditi tersebut tidak mengalami kesulitan untuk dikembangkan karena sudah lama ditanam oleh petani-petani di Manggarai. Hingga tahun 2009, upaya ekstensifikasi tanaman Kakao mencapai 833 ha, Cengkeh 1.300 ha, Jambu Mete 926 ha, Kopi 830 ha dan Jarak pagar 9 ha; usaha intensifikasi tanaman Kopi mencapai 160 ha; usaha diversifikasi tanaman Kopi dengan Jahe mencapai 25 ha; dan rehabilitasi tanaman Kopi mencapai 180 ha. Yang perlu diperhatikan pada masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan hasil yang sesuai dengan tuntutan pasar global dan nasional. Hal ini penting dalam rangka mengantisipasi gejolak harga jual dari berbagai komoditi tersebut.

Perkembangan pembangunan sektor Perkebunan hingga tahun 2009 yakni (Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai):

1. Perkembangan luas areal komoditi perkebunan sangat bervariasi dan fluktuatif dari tahun ke tahun yakni: (i) **Kopi:** meningkat dari 6.631,46 ha tahun 2005 menjadi 6.808,75 ha tahun 2006, menurun menjadi 6.667,73 ha tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi 6.803,62 ha tahun 2008 dan 7.029,28 ha tahun 2009; (ii) **Kelapa:** meningkat dari 3.580,47 ha tahun 2005 menjadi 3.582,58 ha tahun 2006, menurun menjadi 3.578,34 ha tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi 3.577,19 ha tahun 2008 dan tahun 2009; (iii) **Cengkeh:** meningkat dari 1.092,68 ha tahun 2005 menjadi 1.109,56 ha tahun 2006, 1.239,55 ha tahun 2007, 1.255,52 ha tahun 2008 dan 1.423,38 ha tahun 2009; (iv) **Jambu Mete:** meningkat dari 5.832,57 ha tahun 2005 menjadi 5.834,96 ha tahun 2006, 5.888,32 ha tahun 2007, dan 5.914,75 ha tahun 2008 dan menurun menjadi 5.781,34 ha tahun 2009; (v) **Vanili:** menurun dari 347,54

ha tahun 2005 menjadi 344,37 ha tahun 2006, 160,17 ha tahun 2007, dan 152,43 ha tahun 2008 dan 2009; (vi) **Kakao:** meningkat dari 570,24 ha tahun 2005 menjadi 669,36 ha tahun 2006, 844,06 ha tahun 2007, 867,55 ha tahun 2008 dan 980,86 ha tahun 2009; (vii) **Kapuk:** meningkat dari 749,54 ha tahun 2005 menjadi 770,40 ha tahun 2006, menurun menjadi 766,59 ha tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi 769,73 ha tahun 2008 dan 770,73 ha tahun 2009; (viii) **Kemiri:** meningkat dari 6.032,04 ha tahun 2005 menjadi 6.158,47 ha tahun 2006, menurun menjadi 6.150,19 ha tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi 6.163,24 ha tahun 2008 dan 6.218,33 ha tahun 2009; dan (ix) **Pinang:** meningkat dari 711,85 ha tahun 2005 menjadi 722,07 ha tahun 2006, menurun menjadi 721,80 ha tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi 725,11 ha tahun 2008 dan 725,65 ha tahun 2009.

2. Perkembangan produksi komoditi perkebunan hingga tahun 2009 sangat bervariasi dan fluktuatif dari tahun ke tahun yakni: (i) **Kopi:** menurun dari 1.923,80 ton tahun 2005 menjadi 1.544,23 ton tahun 2006, meningkat lagi menjadi 1.630,38 ton tahun 2007, menurun lagi menjadi 1.595,56 ton tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 1.629,32 ton tahun 2009; (ii) **Kelapa:** meningkat dari 538,95 ton tahun 2005 dan 2006 menjadi 541,50 ton tahun 2007, 544,15 ton tahun 2008 dan 580,25 ton tahun 2009; (iii) **Cengkeh:** menurun dari 61,70 ton tahun 2005 menjadi 58,45 ton tahun 2006, meningkat lagi menjadi 217,14 ton tahun 2007, menurun lagi menjadi 187,19 ton tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 239,80 ton tahun 2009; (iv) **Jambu Mete:** meningkat dari 654,30 ton tahun 2005 menjadi 654,67 ton tahun 2006, 684,53 ton tahun 2007, 687,59 ton tahun 2008 dan 750,99 ton tahun 2009; (v) **Vanili:** menurun dari 37,14 ton tahun 2005 menjadi 33,31 ton tahun 2006, 10,98 ton tahun 2007, dan 9,01 ton tahun 2008 dan 2009; (vi) **Kakao:** meningkat dari 43,45 ton tahun 2005 menjadi 44,51 ton tahun 2006, 92,65 ton tahun 2007, 96,45 ton tahun 2008 dan 133,55 ton tahun 2009; (vii) **Kapuk:** menurun dari 58,47 ton tahun 2005 menjadi 54,47 ton tahun 2006, dan meningkat lagi menjadi 59,95 ton tahun 2007, 62,05 ton tahun 2008 dan 68,20 ton tahun 2009; (viii) **Kemiri:** menurun dari 696,50 ton tahun 2005 menjadi 688,30 ton tahun 2006, meningkat lagi menjadi 696,92 ton tahun 2007, 891,70 ton tahun 2008 dan 938,20 ton tahun 2009; dan (ix) **Pinang:** meningkat dari 39,78 ton tahun 2005 menjadi 40,18 ton tahun 2006, 43,96 ton tahun 2007, 45,61 ton tahun 2008 dan 45,73 ton tahun 2009.

3. Perkembangan produktivitas rata-rata komoditi Perkebunan per satuan luas sampai dengan tahun 2009 yakni: (i) **Kopi:** menurun dari 467,08 kg/ha tahun 2005 menjadi 357,81 kg/ha tahun 2006, meningkat lagi menjadi 386,06 kg/ha tahun 2007, menurun lagi menjadi 372,31 kg/ha tahun 2008 dan 358,87 kg/ha tahun 2009; (ii) **Kelapa:** menurun dari 292,72 kg/ha tahun 2005 menjadi 264,07 kg/ha tahun 2006, meningkat lagi menjadi 269,16 kg/ha tahun 2007, menurun lagi menjadi 268,12 kg/ha tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 312,45 kg/ha tahun 2009; (iii) **Cengkeh:** menurun dari 136,05 kg/ha tahun 2005 menjadi 113,55 kg/ha tahun 2006, meningkat lagi menjadi 366,98 kg/ha tahun 2007, menurun lagi menjadi 339,93 kg/ha tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 396,06 kg/ha tahun 2009; (iv) **Jambu Mete:** menurun dari 257,14 kg/ha tahun 2005 menjadi 202,49 kg/ha tahun 2006, meningkat lagi menjadi 283,64 kg/ha tahun 2007, menurun lagi menjadi 219,48 kg/ha tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 285,36 kg/ton tahun 2009; (v) **Vanili:** meningkat dari 197,47 kg/ha tahun 2005 menjadi 198,05 kg/ha tahun 2006 dan 260 kg/ha tahun 2007, menurun lagi menjadi 184,52 kg/ha tahun 2008 dan 114,41 kg/ha tahun 2009; (vi) **Kakao:** meningkat dari 148,57 kg/ha tahun 2005 menjadi 170,14 kg/ha tahun 2006, 296,16 kg/ha tahun 2007, 300,09 kg/ha tahun 2008 dan 304,73 kg/ha tahun 2009; (vii) **Kapuk:** menurun dari 153,65 kg/ha tahun 2005 menjadi 151,35 kg/ha tahun 2006, dan meningkat lagi menjadi 184,74 kg/ha tahun 2007 dan 161,07 kg/ha tahun 2008 dan menurun lagi menjadi 177,16 kg/ha tahun 2009; (viii) **Kemiri:** menurun dari 281,28 kg/ha tahun 2005 menjadi 255,43 kg/ha tahun 2006, meningkat lagi menjadi 304,04 kg/ha tahun 2007, 383,63 kg/ha tahun 2008 dan 361,94 kg/ha tahun 2009; dan (ix) **Pinang:** menurun dari 102,90 kg/ha tahun 2005 menjadi 98,38 kg/ha tahun 2006, meningkat lagi menjadi 147,63 kg/ha tahun 2007, menurun lagi menjadi 146,94 kg/ha tahun 2008 dan 115,21 kg/ha tahun 2009.

Dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas komoditi perkebunan maka pembenahan SDM petani tetap dilaksanakan, yang sampai dengan tahun 2009 kelompok tani binaan Perkebunan berjumlah 394 kelompok yang tersebar pada 9 kecamatan. Sementara itu untuk kemudahan ketersediaan bibit tanaman perkebunan yang berkualitas maka sejak 2005 sampai dengan 2009 telah dibina 18 kelompok penangkar tanaman perkebunan.

Dalam rangka meningkatkan mutu hasil komoditi perkebunan maka sejak tahun 2005 Pemerintah telah memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat mesin pengolah hasil perkebunan komoditi Kopi sebanyak 4 unit.

2.1.2.5.3. Sumber Daya Peternakan

Pengembangan subsektor peternakan di Kabupaten Manggarai dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Manggarai dan menjadi salah satu sumber pasokan ternak bagi daerah lain baik untuk jenis ternak besar, ternak sedang, maupun ternak kecil. Berbagai upaya pengembangan telah dilaksanakan, yang tergambar pada hasil yang cukup yang ditandai oleh meningkatnya populasi ternak.

Peningkatan terbesar terlihat pada populasi Kelompok Ternak kecil yang meningkat 18% pada kurun waktu 2005-2009. Pada kelompok ini, jumlah Kambing meningkat 13% dari 17.541 ekor (2005) menjadi 19.865 ekor (2008), sedangkan jumlah Babi meningkat 20% dari 30.002 ekor (2005) menjadi 36.287 ekor (2008).

Kelompok Ternak unggas, yang merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak di Manggarai, mengalami peningkatan 8% pada kurun waktu 2005-2009. Pada kelompok ini, jumlah Itik meningkat 21% dari 1.755 ekor (2005) menjadi 2.138 ekor (2009). Jumlah Ayam Buras juga meningkat 12% dari 84.987 ekor (2005) menjadi 94.639 ekor (2009). Sedangkan jumlah Ayam Ras mengalami penurunan 8% dari 23.238 ekor (2005) menjadi 21.241 ekor (2009).

Pada Kelompok Ternak Besar, tercatat peningkatan 7% pada kurun waktu 2005-2009. Peningkatan terbesar terjadi pada Populasi Sapi yang meningkat 7,7% dari 8.990 ekor (2005) menjadi 9.684 ekor (2009). Ternak Kerbau meningkat 6,2% dari 5.971 ekor (2005) menjadi 6.339 ekor (2009). Peningkatan terkecil dalam kelompok ini terjadi pada Populasi Kuda yang hanya meningkat 5% dari 397 ekor (2005) menjadi 417 ekor (2009).

Sementara itu, perkembangan perdagangan ternak antarpulau mengalami fluktuasi, yang terutama terjadi karena pengaruh permintaan dan penyediaan ternak yang kurang stabil dan juga diakibatkan adanya pemekaran kabupaten. Pada kelompok Ternak Besar, terjadi penurunan 31%, dalam perdagangan antarpulau pada kurun waktu 2005-2009 dari 4.023 ekor menjadi 2.793 ekor. Ternak Kerbau mengalami penurunan terbesar yaitu 38%, dari 2.621 ekor (2005) menjadi 1.606 ekor (2009). Penurunan ini juga terjadi pada ternak Sapi yang menurun 16% dari 1.173 ekor (2005) menjadi 984 ekor (2009) dan ternak Kuda menurun 11% dari 229 ekor (2005) menjadi 203 ekor (2009).

Selain untuk diantarpulaukan, sebagian ternak yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Manggarai. Seiring dengan berkurangnya permintaan masyarakat, telah terjadi penurunan dalam jumlah pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH). Penurunan terbesar terjadi pada ternak Kerbau yang menurun 57% dari 178 ekor (2005) menjadi 76 ekor (2009). Menurunnya jumlah pemotongan juga terjadi pada ternak Babi yang menurun 31% dari 4.123 ekor (2005) menjadi 2.837 ekor (2009). Selain itu, penurunan jumlah pemotongan ternak juga terjadi pada ternak Kambing menurun 23% dari 195 ekor (2005) menjadi 150 ekor (2009).

Kendatipun tingkat perkembangan subsektor peternakan di Kabupaten Manggarai mengalami fluktuasi, namun peran subsektor peternakan masih dapat menjadi salah satu subsektor strategis untuk dikembangkan, baik untuk diperdagangkan hidup maupun dalam bentuk olahan.

2.1.2.5.4. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja di daerah pesisir dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir. Pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Manggarai difokuskan pada beberapa area pengembangan, yakni Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Budi daya Perikanan serta Pengembangan Kawasan Budi daya Air Payau dan Air Tawar.

Pengembangan Perikanan Tangkap menggambarkan suatu perkembangan yang menggembirakan dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 54% dari 2.277,6 ton pada tahun 2005 menjadi 3.515,12 ton pada tahun 2009. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah armada perikanan dari 512 unit (2005) menjadi 600 unit (2009) dan meningkatnya jumlah alat tangkap dari 536 unit (2005) menjadi 974 unit (2009). Peningkatan hasil produksi juga terjadi pada perikanan budi daya yang meningkat 55% dari 35,68 ton (2005) menjadi 55,36 ton (2009). Hal ini disebabkan oleh peningkatan luas kolam dari 61,61 Ha (2005) menjadi 80,08 Ha (2009) dan perluasan mina padi dari 50,95 Ha (2005) menjadi 54,42 Ha (2009). Berbagai peningkatan tersebut juga didukung oleh peningkatan jumlah kelompok binaan pemerintah yang meningkat dari 9 kelompok (2005) menjadi 77 Kelompok (2009).

Permasalahan penting dalam bidang perikanan yang masih harus dicarikan solusinya ialah:

- 1) Pengembangan Kawasan Budi daya Air Payau dan Air Tawar, yang terlihat dari penurunan jumlah produksi tambak dan produksi rumput laut, yang masing-masing menurun dari 1,48 ton (2005) menjadi 0,99 ton (2009) serta 50 ton (2005) menjadi 34,6 ton (2009).
- 2) Menekan tingkat *illegal fishing* yang meskipun telah menurun drastis dari 35 kasus (2005) menjadi 5 kasus (2009), namun tetap memberikan dampak negatif bagi ekosistem laut apabila masih terus terjadi.
- 3) Terbatasnya anggaran untuk mengadakan peralatan yang bisa mendeteksi penyakit ikan yang banyak terjadi di Kelompok-Kelompok Binaan dan masyarakat umum; serta untuk membiayai beberapa program, seperti Budi daya Udang dan Pengadaan Sarana Pendukung lainnya.
- 4) Tingkat persentase produksi ikan dalam daerah belum memungkinkan untuk diekspor ke luar daerah karena terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan seperti kapal-kapal yang berukuran 10-30 GT.
- 5) Masih rendahnya keterampilan nelayan, sehingga tidak mampu melakukan operasi penangkapan dengan kapal-kapal ukuran 15-30 GT.
- 6) Masih rendahnya pendapatan nelayan, sehingga tidak mampu membeli Bahan Bakar dalam jumlah besar untuk mengoperasikan kapal-kapal dan pengadaan suku cadang. Akibatnya ialah tidak lancarnya pengembalian atau penyeteroran Dana Bergulir dari Program Penguatan Modal Pemerintah lewat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- 7) Pada bidang perikanan air tawar, masalah kekurangan air tetap menjadi hambatan penting selama aktivitas perambahan hutan tidak dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi perkembangan proses pembenihan perikanan rakyat.

2.1.2.6. Sektor Sekunder

Pada Sektor Sekunder, perekonomian Kabupaten Manggarai didominasi oleh Sektor Bangunan/Konstruksi yang pada tahun 2006-2008 secara rata-rata menyumbang 92% terhadap PDRB Sektor Sekunder. Terhadap Total PDRB, Sektor Bangunan/Konstruksi secara rata-rata hanya menyumbang 8% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2006-2008. Di satu sisi, tingginya sumbangan Sektor Bangunan/Konstruksi merupakan hal positif karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar; sedangkan pada sisi lain, hal ini juga merupakan salah satu sumber arus uang

keluar (*capital flight*) Manggarai karena sebagian *input* produksi yang merupakan bahan nonlokal harus didatangkan dari luar Manggarai.

Sektor Industri Pengolahan terlihat mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB Sektor Sekunder hanya 8%; sedangkan terhadap Total PDRB Kabupaten Manggarai sumbangan Sektor Industri Pengolahan rata-rata hanya 1%. Meski tidak banyak menciptakan Nilai Tambah, sebagaimana tergambar dalam nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan, namun perkembangan Sektor Industri selama 3 tahun terakhir menunjukkan suatu peningkatan. Perusahaan yang tergolong industri kecil dan menengah, misalnya, meningkat dari 1.925 buah pada tahun 2005 menjadi 2.079 buah tahun 2008. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri juga meningkat dari 3.059 orang pada tahun 2005 menjadi 3.540 orang tahun 2008; sedangkan Nilai Investasi mengalami peningkatan dari Rp. 7.584.265.000,- (2005) menjadi Rp. 10.275.027.000,- (2008), yang terjadi bersamaan dengan peningkatan Nilai Produksi dari Rp. 7.235.597.000,- (2005) menjadi Rp. 10.104.588.000,- (2008).

Salah satu hambatan penting dalam pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Manggarai ialah ketersediaan energi/listrik sebagai salah satu input produksi, meskipun persoalan krisis listrik/krisis energi merupakan persoalan global dan nasional yang masih diupayakan solusinya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Manggarai harus diakui masih sangat terbatas, mengingat cakupan pelayanan listrik yang baru mencapai 16,7% atau 10.159 KK yang menikmati listrik dari total 60.823 KK yang berdomisili di Manggarai pada tahun 2008. Selain itu, ada 204 KK lainnya yang mengandalkan penerangan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada tahun 2008. Dalam konteks mengatasi krisis listrik ini, beroperasinya PLTPB Ulumbu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi penyediaan listrik baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi dalam industri.

2.1.2.7. Sektor Tersier

Pada Sektor Tersier, perekonomian Manggarai masih didominasi oleh Sektor Jasa-Jasa, yakni Jasa Pemerintahan dan Jasa Swasta. Dominasi Jasa Pemerintahan menunjukkan bahwa pergerakan roda ekonomi Kabupaten Manggarai masih sangat tergantung pada Belanja dan Investasi Pemerintah. Ini berarti bahwa jika keuangan

pemerintah mengalami masalah, maka perekonomian Manggarai secara keseluruhan akan sangat terganggu. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan dan situasi yang kondusif agar belanja dan investasi swasta semakin berperan dalam mengembangkan perekonomian Manggarai, dalam mengantisipasi keterbatasan pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah.

2.1.2.7.1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Selain Sektor-Jasa-Jasa, sektor lain yang sangat berperan dalam perekonomian Manggarai ialah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yang memberikan kontribusi sebesar 10% terhadap Total PDRB Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2006-2008. Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Manggarai 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini tampak dari bertambahnya perusahaan perdagangan formal yang meningkat dari 495 buah (2005) menjadi 1.227 buah (2008) atau meningkat rata-rata 30% per tahun. Bersamaan dengan itu, penyerapan tenaga kerja perdagangan formal meningkat dari 4.540 orang (2005) menjadi 5.929 orang atau 30,6% (2008). Jumlah pedagang informal juga meningkat dari 3.714 orang (2005) menjadi 4.478 orang atau 20,57% (2008) atau 6,86% per tahun. Sementara itu Perdagangan Antar Pulau meningkat dari 12.563, 18 ton (2005) menjadi 25.229 ton atau 100,82% (2008) atau 33,60% per tahun; sedangkan ekspor non migas meningkat dari 46.988,264 ton (2005) menjadi 109.362,972 ton atau 132,75% (2008) atau 44,25% per tahun.

Selain perkembangan sub sektor perdagangan yang cukup baik, perhatian lebih harus diarahkan pada perkembangan sektor pariwisata yang menjadi basis penting dalam peningkatan nilai tambah sub sektor Hotel dan Restoran. Dalam kurun waktu 2006-2008, kontribusi sub sektor hotel hanya berkisar antara 0,04%-0,05% dari Total PDRB, sedangkan kontribusi sub sektor restoran berkisar antara 0,2%-0,3% dari Total PDRB Kabupaten Manggarai. Dari sisi pengembangan pariwisata, rendahnya kontribusi ini bisa ditelusuri antara lain dari beberapa faktor berikut: (1) **Arus Kunjungan**, yang meskipun mengalami peningkatan dari 5.483 orang pada tahun 2005 menjadi 8.250 orang pada tahun 2008, namun masih tidak mampu meningkatkan nilai tambah ekonomis secara signifikan; (2) **Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan**, yang tidak mengalami perubahan, yakni 3 hari; (3) **Jumlah Belanja Wisatawan**, yang hanya sebesar Rp. 439.375 per hari.

2.1.2.7.2. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai dalam 5 tahun terakhir hanya berkisar antara 2%-4%. Khusus bidang Keuangan dan Perbankan, rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh tidak dapat dimanfaatkannya seluruh tabungan masyarakat yang disimpan dalam sistem perbankan sebagai pinjaman. Sebagai contoh, dari total tabungan masyarakat Manggarai sebesar Rp. 513.792.911.589,- pada tahun 2008, yang dikonversikan dalam bentuk pinjaman sebesar Rp. 472.478.635.118,-. Ini berarti bahwa ada sekitar Rp. 41.314.276.471,- (8% dari total tabungan) yang tidak dapat dimanfaatkan untuk investasi di Manggarai, melainkan diinvestasikan di luar Manggarai (*capital flight*). Hal ini antara lain disebabkan baik oleh tidak layakannya pelaku usaha untuk memperoleh kredit (*non-bankable*) maupun oleh karena persyaratan mendapatkan kredit yang masih sulit dipenuhi oleh pelaku usaha, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan.

Dalam pengembangan Koperasi, juga terlihat adanya peningkatan terutama dari sisi efisiensi usaha. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan Modal Sendiri sebesar 58% dalam kurun waktu 2005-2008 dari Rp. 6.427.476.901,- pada tahun 2005 menjadi Rp. 10.148.608.621,- pada tahun 2009. Bersamaan dengan itu, Modal Luar juga menurun 0,1% dari Rp. 5.894.759.419,- menjadi Rp. 5.891.343.532,-. Sejalan dengan peningkatan modal sendiri tersebut, juga telah terjadi peningkatan total aset sebesar 30% dari Rp. 12.322.236.320,- menjadi Rp. 16.039.952.153,-. Berbagai peningkatan tersebut berujung pada peningkatan Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha yang menjadi hak anggota koperasi. Dalam kurun waktu 2005-2009, telah terjadi peningkatan volume usaha sebesar 89% dari Rp. 9.901.544.027,- menjadi Rp. 18.709.949.450,-, bersamaan dengan meningkatnya Sisa Hasil Usaha sebesar 125% dari Rp. 1.004.709.565,- pada tahun 2004 menjadi Rp. 2.260.377.086,- pada tahun 2009.

Selain Perbankan dan Koperasi, lembaga keuangan lain yang juga memberikan kontribusi penting baik untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun untuk keperluan konsumsi masyarakat ialah **Pegadaian**. Berbagai kemudahan dalam proses pengajuan kredit di Perum Pegadaian mengakibatkan peningkatan animo masyarakat untuk mengajukan kredit. Dalam kurun waktu 2006-2008, terjadi peningkatan kucuran kredit yang sangat signifikan dari Rp. 19.346.565.000,- (2006) menjadi Rp. 188.679.915.500,- (2008). Peningkatan kredit dari Perum Pegadaian yang sebesar 287% dalam kurun waktu 2 tahun tersebut telah direspons oleh masyarakat dengan pemanfaatan kredit yang cukup

baik, yang dibuktikan dengan tingkat pelunasan kredit yang cukup baik. Hal ini terlihat, misalnya, dari Rp. 188.679.915.500,- kredit yang dikucurkan pada tahun 2008, tingkat pelunasannya mencapai 90% atau sekitar Rp. 169.371.372.500,-.

Berbagai perkembangan dalam jasa-jasa keuangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah mendorong peningkatan kondisi perdagangan di Kabupaten Manggarai. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan/usaha sektor perdagangan dari 611 unit pada tahun 2005 menjadi 1.227 unit pada tahun 2008. Peningkatan terbesar terjadi pada Usaha Perdagangan Besar yang meningkat dari 25 unit menjadi 116 unit, sedangkan Usaha Perdagangan Menengah meningkat dari 90 menjadi 270 unit dan Usaha Perdagangan Kecil meningkat dari 385 unit menjadi 841 unit. Meski demikian, peran Usaha Kecil dan Menengah terlihat masih dominan karena menguasai 68% (841 dari total 1.227 unit) dari total jumlah perusahaan dagang di Kabupaten Manggarai.

Peningkatan jumlah perusahaan dagang yang beroperasi di Manggarai juga berakibat pada peningkatan volume bongkar muat barang dari Pelabuhan Kedindi-Reo. Volume muat barang mengalami peningkatan drastis dari 6.933,09 ton pada tahun 2005 menjadi 70.191,97 ton pada tahun 2008. Peningkatan drastis tersebut disebabkan oleh adanya ekspor Mangan sejumlah 64.966,97 ton pada tahun 2008. Dengan demikian, jika volume ekspor Mangan dikeluarkan dari perhitungan, maka terlihat bahwa volume muat barang-barang perdagangan non-tambang mengalami penurunan 35% dari 6.933,09 ton pada tahun 2005 menjadi 4.494,50 ton pada tahun 2008.

Volume bongkar barang juga menunjukkan gejala penurunan, yaitu menurun sebesar 15% dari 45.903 ton pada tahun 2005 menjadi 38.727 ton pada tahun 2008. Meski demikian, penurunan volume bongkar muat barang sebagaimana diuraikan di atas, tidak harus ditafsirkan sebagai adanya penurunan dalam volume perdagangan antar pulau dan ekspor/impor, karena adanya kemungkinan barang-barang tersebut diantarpulaukan dengan menggunakan jalur transportasi darat dan atau memanfaatkan jasa Pelabuhan Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat).

2.1.2.8. Lapangan Kerja dan Tenaga Kerja

Masalah sosial ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat Manggarai secara umum terbagi atas 2 (dua), yakni (i) Pengangguran dan (ii) Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini

mengakibatkan terjadinya pengangguran terbuka baik pada kalangan terdidik maupun tidak terdidik. Pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur dan angkatan kerja. Pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai pada kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan, yakni dari 1,78% (2004) menjadi 2,49% (2008). Hal ini disebabkan karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat (5,7%) dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah orang yang bekerja (5,0%).

Lapangan kerja utama dari pekerja di Kabupaten Manggarai tahun 2008 ialah pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan yang tercatat sebesar 216.526 orang (85,8%), dengan status pekerjaan utama merupakan pekerja keluarga sebesar 45,8% dan buruh tidak tetap sebesar 35,1%. Masih tingginya persentasi penduduk yang bekerja pada sektor primer, sementara di sisi lain nilai kontribusinya terhadap perekonomian yang semakin kecil setidaknya menunjukkan 2 (dua) hal berikut:

- 1) Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Manggarai, yang dalam hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian.
- 2) Adanya persoalan dalam struktur pasar *input* dan *output* pertanian/perkebunan. Dalam hal ketersediaan pupuk, misalnya, seringkali terjadi kelangkaan ketersediaan pupuk dan fluktuasi harga pupuk yang disebabkan oleh monopoli penyediaan pupuk di Indonesia. Sedangkan dalam hal pasar *output*, persoalan timbul karena stabilisasi harga beras oleh Bulog yang menyebabkan tertekannya nilai jual beras petani serta fluktuasi harga internasional berbagai komoditi perkebunan yang ditentukan oleh perubahan permintaan dan penawaran pasar global.

2.1.2.9. Pembiayaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai sebagian besar dibiayai oleh Pemerintah Pusat yakni Dana Perimbangan melalui Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK. Sampai tahun 2005, kontribusi Dana Perimbangan masih lebih dari 80% dari Total APBD Kabupaten Manggarai; sedangkan kontribusi PAD hanya berkisar antara 3%–4% dan sisanya merupakan kontribusi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pada sisi PAD, kontribusi terbesar disumbangkan oleh Pos Lain-Lain yang Sah yang menyumbang antara 30-45% dari Total PAD. Pada Pos Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum masih berperan penting yakni dengan kontribusi di atas 80%. Selain dana-dana

yang bersumber dari APBD, penyelenggaraan pembangunan daerah juga bersumber dari Dana-Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang pemanfaatannya diserahkan kepada berbagai instansi terkait di daerah.

2.1.2.10. Pembangunan Pedesaan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai saat ini masih bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Selama ini wilayah pedesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman pedesaan. Sektor pertanian yang menjadi sendi utama perekonomian masyarakat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan angkatan kerja pedesaan yang terus meningkat tidak seimbang dengan ketersediaan lahan pertanian, berdampak pada tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja serta menurunnya produktivitas per pekerja pada sektor pertanian.

Oleh karena itu sangat penting untuk mendorong penciptaan lapangan kerja non-pertanian di pedesaan guna menekan angka kemiskinan dan mencegah meningkatnya arus urbanisasi ke perkotaan. Upaya peningkatan infrastruktur pedesaan seperti irigasi, jalan, listrik, perbaikan lingkungan pemukiman dan pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang berbasis sumber daya pedesaan akan mendorong perluasan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan sekaligus meredam perpindahan penduduk dari desa ke kota.

2.1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang penting dalam pembangunan suatu wilayah. Kebijakan yang ditempuh bagi daerah yang memiliki sarana dan prasarana relatif memadai ialah dengan mengoptimalkan pemanfaatannya; sedangkan bagi daerah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, kebijakan yang ditempuh ialah dengan memperluas pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka memudahkan mobilitas fisik dan sosial.

Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Manggarai hingga saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas dan kualitas. Akibatnya ialah sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sosial dan ekonomi termasuk dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan, mendorong sektor produksi atau mendukung pengembangan wilayah.

2.1.3.1. Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara

Pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara memiliki peran yang sangat strategis bagi mobilitas manusia, barang dan jasa, sekaligus untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah pedesaan dan perkotaan. Infrastruktur transportasi yang dibangun di Kabupaten Manggarai meliputi: prasarana jalan dan jembatan (transportasi darat); pelabuhan dan pelabuhan rakyat (transportasi laut); dan pelabuhan udara (transportasi udara).

Perhubungan Darat

Pembangunan prasarana jalan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk kategori jalan raya telah terjadi peningkatan **jalan beraspal** khususnya peningkatan jalan lokal primer dari 100 km (2005) menjadi 566,12 km (2009), sedangkan **telford** meningkat dari 62 km (2005) menjadi 150,48 km (2009) dan **pembukaan jalan baru** dari 12,8 km (2005) menjadi 187,91 Km (2009). Untuk kategori **Jembatan**, telah mengalami peningkatan dari 34 buah (2005) menjadi 70 buah (2009). Karena berbagai peningkatan itulah, maka rasio panjang jalan dengan luas wilayah juga ikut meningkat dari 0,0352 pada tahun 2005 menjadi 0,139 pada tahun 2009. Dari sisi kualitas, juga terlihat adanya peningkatan yang ditunjukkan oleh peningkatan dalam rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang meningkat dari 1 : 10,83 Km pada tahun 2005 menjadi 1 : 90 Km pada tahun 2009.

Untuk menunjang kelancaran transportase, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah membangun dan mengoperasikan 4 (empat) Terminal, yakni: Terminal Kota Ruteng, Cancar, Carep dan Mena. Meski kondisi terminal-terminal tersebut belum memadai, namun masih tetap dapat dimanfaatkan sebagai tempat transit yang layak untuk penumpang. Sementara itu, jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Manggarai terus meningkat yakni dari 1.290 kendaraan tahun 2005 menjadi 1.484 pada tahun 2009. Peningkatan serupa juga terjadi pada arus penumpang angkutan umum yang meningkat 10% dalam kurun waktu 2005-2009, yaitu dari 3.794.555 orang (2005) menjadi 4.204.964 orang (2009).

Perhubungan Laut

Perkembangan bidang perhubungan laut pascapemekaran Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa pelabuhan laut yang berfungsi secara efektif hanya 1 (satu) buah yakni Pelabuhan Kedindi-Reo dengan arus kunjungan kapal, baik pelayaran rakyat,

pelayaran nasional, pelayaran perintis, pelayaran khusus maupun pelayaran internasional selama tahun 2008 sebanyak 356 buah serta penumpang naik sebanyak 1.012 orang dan yang turun sebanyak 1.080 orang. Arus bongkar yakni barang sebanyak 58.704 ton dan BBM 42.875 Kilo Liter; sedangkan arus muat yakni barang sebanyak 86.452 ton dan hewan 197 ekor. Dalam hal pengembangan pelabuhan rakyat, masih perlu perhatian yang lebih terutama untuk mengubah opini atau mencegah sinyalemen bahwa pelabuhan rakyat merupakan tempat penyelundupan hasil bumi dan hewan keluar dan masuk dari dan ke Kabupaten Manggarai. Dalam konteks peningkatan pelayanan perhubungan laut, perlu dipikirkan peningkatan pelabuhan Kedindi-Reo, sehingga pada saatnya bisa menjadi pelabuhan berskala besar, untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Manggarai.

Perhubungan Udara

Perkembangan bidang Perhubungan Udara juga masih memerlukan perhatian mengingat peran penting bidang ini dalam penyediaan *moda transportasi* yang lebih cepat. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Manggarai memiliki 1 (satu) Bandar Udara yaitu Bandara Frans Sales Lega yang hanya dapat didarati oleh pesawat jenis Cassa atau pesawat jenis Foker 27. Frekuensi pesawat yang datang maupun berangkat melalui Bandara Frans Sales Lega mengalami peningkatan yakni dari 255 kali pada tahun 2005 menjadi 338 kali pada tahun 2008. Arus penumpang yang datang dan berangkat pun mengalami peningkatan yakni dari 4.721 orang (datang) dan 5.187 orang (berangkat) pada tahun 2005 menjadi 11.768 orang (datang) dan 10.620 orang (berangkat) pada tahun 2008. Sementara itu volume bongkar-muat barang mengalami peningkatan yakni dari 10.829 Kg (bongkar) dan 8.658 Kg (muat) pada tahun 2005 menjadi 37.496 Kg (bongkar) dan 16.715 Kg (muat) pada tahun 2007. Meski terjadi peningkatan arus penumpang dan arus bongkar muat barang, namun pelayanan Bandar Udara Frans Sales Lega masih belum dapat dikembangkan secara optimal yang antara lain disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang menguntungkan serta panjang landasan yang kurang memadai. Karenanya perlu disepakati jalan keluar lain dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perhubungan udara.

2.1.3.2. Akses terhadap air minum bersih dan sanitasi

 Secara umum, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Manggarai telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah KK yang

menikmati air minum bersih dari 25.411 KK pada tahun 2005 menjadi 39.279 KK pada tahun 2009 (atau sudah mencapai 66%). Sementara jumlah Rumah Tangga bersanitasi juga meningkat dari 77% pada tahun 2005 menjadi 80,5% pada tahun 2009. Meskipun demikian, sebagai daerah bercurah hujan tinggi dengan jumlah curah hujan rata-rata 2.440,9 mm dan rata-rata bulan basah setiap tahun yakni 7 (tujuh) bulan, persoalan besar yang masih harus diatasi yaitu akses terhadap air bersih yang belum dapat dijangkau semua penduduk.

- ✚ Keterbatasan akses terhadap air bersih ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal berikut : (1) Dari sisi pemerintah, terbatasnya anggaran dalam menyediakan sarana air minum bersih bagi masyarakat maupun dalam melestarikan lingkungan di sekitar mata air; (2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana air bersih yang telah dibangun dan dalam melestarikan lingkungan di sekitar mata air; (3) Dari sisi lingkungan, makin menurunnya daya dukung alam dalam memproduksi air bersih, baik karena ulah manusia maupun kondisi alam itu sendiri. Berbagai keterbatasan untuk mengakses sumber air bersih tersebut mengakibatkan masyarakat mengkonsumsi air dari sumber yang tidak higienes, seperti dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung dan sungai. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat terutama anak-anak dan balita.
- ✚ Untuk meningkatkan pelayanan air minum bersih kepada masyarakat, Pemerintah telah berupaya memperluas jangkauan pelayanan air minum, antara lain melalui PDAM. Peningkatan ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan PDAM dari 7.832 pelanggan pada tahun 2006 menjadi 100.244 pelanggan pada tahun 2008. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah air yang disalurkan dari 2.012.216 m³ pada tahun 2006 menjadi 2.614.836 m³ pada tahun 2008. Meski demikian, pelayanan PDAM masih menghadapi kendala dalam pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan perpipaan; dalam menemukan sumber air baru dan dalam meningkatkan debit air yang sudah ada; serta menghadapi rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara berbagai jaringan perpipaan yang telah dibangun.
- ✚ Peningkatan ketersediaan air minum bersih di Kabupaten Manggarai masih sangat potensial karena masih terdapat sumber-sumber air yang belum dikembangkan; belum optimalnya produktivitas sumber-sumber air yang ada serta efisiensi pemanfaatan air oleh masyarakat yang saat ini masih dapat ditingkatkan. Hal ini akan semakin memberikan dampak yang baik jika konservasi terhadap DAS dan sumber-sumber mata

air terus dikembangkan sehingga tidak menimbulkan krisis air bersih, seperti yang sudah mulai terasa di beberapa tempat.

- Secara umum kondisi sanitasi di Kabupaten Manggarai masih tidak memadai, terutama di pedesaan dan kawasan pesisir pantai. Jumlah rumah tangga yang tidak dapat memiliki sarana sanitasi yang memadai yaitu tidak memiliki kamar mandi sendiri atau tidak dapat memanfaatkan fasilitas kamar mandi umum masih tinggi. Hingga tahun 2008, jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban baru mencapai 51.297 KK (63,91%). Sementara yang layak pakai dan memenuhi standar kesehatan sebanyak 5.058 buah (4,27%). Tempat Pembuangan Sampah yang digunakan oleh masyarakat juga masih didominasi oleh penggunaan Lubang Tanah (70,26%). Hal ini berarti bahwa sampah tersebut tidak dapat didaur ulang menjadi bahan-bahan lain yang berguna. Selain lubang tanah, tempat penampungan akhir yang masih banyak digunakan adalah Pantai/Tempat terbuka yang digunakan oleh 21,52% rumah tangga di Manggarai. Penggunaan Kolam/sawah dan Sungai/Danau sebagai tempat pembuangan akhir juga masih digunakan oleh masyarakat masing-masing sebanyak 0,34% dan 0,18% rumah tangga. Sedangkan pemanfaatan tanki sampah masih sangat rendah, yaitu sebanyak 5,74% rumah tangga.

2.1.3.3. Energi dan Kelistrikan

Permasalahan utama bidang energi dan kelistrikan terjadi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan. Kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga, perkantoran, perhotelan dan lain-lain belum seluruhnya dilayani PLN juga dalam hal pemerataan distribusi. Selain itu, persoalan penting lain yang masih harus diatasi ialah pemerataan distribusi dan ketidakteraturan suplai yang ditandai oleh seringnya kejadian pemadaman listrik. Terbatasnya sumber daya listrik di Kabupaten Manggarai dalam dasawarsa terakhir mengakibatkan banyak rumah tangga terutama di pedesaan belum menikmati layanan listrik. Data tahun 2008, misalnya, menunjukkan bahwa 63,07% rumah tangga di Kabupaten Manggarai masih menggunakan lampu pelita untuk penerangan rumah; sedangkan yang menggunakan listrik sebesar 35,45% dengan perincian Listrik PLN sebanyak 31,35% dan non PLN 4,10%.

Kendati mengalami kekurangan kapasitas listrik, namun pada sisi lain banyak potensi energi listrik yang belum dikembangkan seperti panas bumi (*geothermal*), tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, *fuel cell* (sel bahan bakar) dan biomasa. Potensi energi

geothermal yang dimiliki Kabupaten Manggarai sebesar 450 MW yang tersebar di beberapa lokasi. Pada sumur ULB-1 tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut karena terdapat kandungan air dan lumpur. Untuk sumur ULB-3 tidak dilakukan pengujian, karena sumur ULB-2 sudah mencapai syarat untuk produksi dengan cadangan pasti sebesar 12 - 15,6 MW. Dalam tahap eksplorasi ini potensi *geothermal* memiliki prospek untuk dikembangkan dengan sasaran produksi 2 x 2,5 MW. Sementara itu, potensi tenaga surya, meski telah dikembangkan sebanyak 204 unit, namun masih harus dioptimalkan penggunaannya.

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk merehabilitasi dan membangun pembangkit listrik baru jelas sangat terbatas. Karenanya, kemitraan swasta, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan listrik perlu dikembangkan terutama melalui penggunaan energi matahari, biodisel, panas bumi, hidro gas dan lain-lain.

2.1.3.4. Pembangunan Permukiman dan Perumahan

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai yang masih tinggi telah memunculkan aneka problem dalam kehidupan, termasuk dalam hal penyediaan kebutuhan perumahan. Karena itu salah satu pusat perhatian pemerintah ialah pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah daerah telah membangun rumah-rumah sederhana dan sangat sederhana yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Manggarai bagi warga masyarakat yang berdomisili di areal transmigrasi lokal serta menyalurkan bantuan pemerintah pusat bagi rumah tangga miskin di beberapa wilayah dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah.

Beberapa hal yang menggembirakan terlihat dari persentase kepemilikan rumah yakni 83,57% merupakan milik sendiri dan hanya 12,07% yang merupakan milik orang tua/sanak saudara. Meski demikian, masih banyak rumah tangga yang memiliki rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan terutama di pedesaan dan kawasan pesisir pantai. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni.

Dalam rangka peningkatan lingkungan permukiman, **drainase lingkungan perkotaan** yang ada telah meningkat dari 53,76Km (2005) menjadi 65,36Km (2009), jalan lingkungan permukiman (lokal sekunder) telah meningkat dari 14,72Km (2005) menjadi 62,79Km (2009).

2.1.3.5. Telekomunikasi/telematika

Dalam satu dasawarsa terakhir, penggunaan berbagai jenis sarana dan prasarana telekomunikasi/telematika meningkat, mulai dari penggunaan telepon, internet, televisi, radio dan lain-lain. Namun demikian, akses terhadap Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi ini dominan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk yang umumnya tinggal di wilayah perkotaan. Secara umum, akses terhadap telekomunikasi/telematika tersebut belum terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang telekomunikasi/telematika tersebut masih terbatas.

Jumlah pelanggan telepon swasta dan Pemerintah mengalami peningkatan yakni dari 341 (bisnis) dan 1.523 buah (perumahan) pada tahun 2006 menjadi 344 (bisnis) dan 1.573 (perumahan) pada tahun 2007. Sementara itu penggunaan telepon seluler (HP) meningkat tajam seiring dengan munculnya *provider* jaringan telepon seluler yang merambah ke setiap kecamatan. Demikian pula media penyiaran (pemerintah dan swasta) berupa radio lokal juga telah berkembang.

Diperkirakan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi, penyiaran dan lain-lain di Kabupaten Manggarai pada masa datang akan berkembang dan meningkat pesat. Investasi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi/telematika terutama swasta diperkirakan akan meningkat sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

2.1.3.6. Sumber daya air dan irigasi

Pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan lahan beririgasi dan peningkatan intensitas tanam. Hal ini terutama dipacu oleh peningkatan pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan peningkatan permintaan akan kebutuhan pangan. Untuk memenuhi permintaan tersebut perluasan areal tanam dan intensitas tanam sangat diperlukan. Namun, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut masih membutuhkan lahan beririgasi yang lebih luas sehingga dapat memberikan hasil pertanian yang lebih baik.

Demikian juga lahan tidur/kritis yang potensial dikembangkan menjadi lahan produktif masih cukup besar, namun belum dapat dimanfaatkan karena terbatasnya sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, hingga tahun 2005 Pemerintah Daerah telah membangun irigasi baik irigasi teknis, irigasi semiteknis maupun irigasi sederhana. Irigasi teknis berupa bangunan bendungan sebanyak 14 buah (11 baik dan 3 rusak berat) dengan

luas areal potensial 12.905 ha dan luas fungsional 5.741 ha. Irigasi semiteknis berupa bangunan bendungan sebanyak 11 buah (9 baik dan 2 rusak berat) dengan luas areal potensial 4.212 ha dan luas fungsional 2.138 ha. Irigasi sederhana berupa bangunan bendungan sebanyak 366 buah (81 baik dan 285 rusak berat) dengan luas areal potensial 36.936 ha dan luas fungsional 18.328 ha.

Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi berupa saluran permanen telah meningkat dari 1,9 km pada tahun 2005 menjadi 56,17 km dan jaringan irigasi pedesaan mengalami peningkatan dari 16 buah pada tahun 2005 menjadi 126 buah pada tahun 2009.

2.1.3.7. Sarana Kesehatan

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain dalam korelasinya dengan jumlah penduduk yang memanfaatkan dan membutuhkan layanan kesehatan. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Manggarai telah cukup memadai. Hingga tahun 2009 telah tersedia 2 buah Rumah Sakit (RSUD Ruteng dan RS St. Rafael Cancar), 15 buah Puskesmas, 60 unit Pustu, 37 buah Poskesdes, 28 buah Polindes, 6 buah Apotik dan 2 buah Balai Pengobatan.

Ratio Fasilitas Kesehatan: Tahun 2008 ratio RS mencapai 1 : 141.145 (tahun 2009 sebesar 1 : 145.254); ratio Puskesmas mencapai 1 : 18.819 jiwa (tahun 2009 mencapai 1 : 19.369 jiwa) yang mana berarti melampaui ratio ideal yakni 1 : 20.000 jiwa; rasio Pustu/Poskesdes dengan Desa/Kelurahan idealnya 1 : 1, kondisi tahun 2008 terdapat 97 Pustu/Poskesdes atau 1 Pustu/Polkesdes melayani kurang lebih 2 desa.

Fasilitas sarana tersebut masih perlu dilengkapi prasarana dan kualitas pelayanan yang lebih memadai serta secara bertahap dilakukan peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas **Poned**.

2.1.3.8. Sarana Pendidikan

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun nonformal, yang tampaknya belum sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dimaksudkan untuk memperluas akses demi terwujudnya peningkatan sumber daya manusia yang ditandai dengan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Berbagai kemajuan yang telah

dicapai dalam memperluas dan pemerataan akses di antaranya dilakukan melalui perbaikan (rehabilitasi) gedung-gedung sekolah yang rusak, penambahan ruang kelas, pembangunan unit gedung baru serta menambah dan mengganti meubelair yang rusak. Berikut digambarkan kemajuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Pada sisi lain, kemampuan keuangan pemerintah untuk membangun kelas/gedung dan sarana dan prasarana pendidikan lainnya seperti teknologi informasi (TI), perpustakaan, sarana sanitasi dan UKS dan sarana pembelajaran lainnya masih terbatas. Jumlah gedung kategori rusak dan rusak berat tinggi dan cenderung meningkat. Selain itu, permasalahan juga terkait dengan masalah distribusi antar wilayah.

Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Cakupan rehabilitasi ruang kelas SD/MI tahun 2006-2008 mencapai 857 ruang kelas. Khusus tahun 2008, rehabilitasi ruang kelas sebanyak 200 ruang. Namun rehabilitasi ini belum menyentuh ruang kelas jenjang pendidikan SMP dan SMA karena pendanaan untuk rehabilitasi hanya mengandalkan dana DAK yang pemanfaatannya dibatasi untuk rehabilitasi ruang kelas SD/MI saja.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Cakupan pembangunan ruang kelas baru SD/MI tahun 2006-2008 mencapai 15 RKB. RKB SMP/MTs mencapai 67 RKB. RKB SMA/MA mencapai 29 RKB. RKB SMK sebanyak 9 RKB.

Pembangunan Unit Gedung Baru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Pada tahun 2006-2008, cakupan pembangunan unit gedung baru SMP/MTs mencapai 49 unit; RKB SMA/MA mencapai 29 unit; RKB SMK sebanyak 9 unit.

Penyediaan Meubelair untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Kebijakan pengadaan meubelair dengan metode penentuan sekolah tertentu yang mendapatkan bantuan meubelair, seyogyanya tidak digunakan lagi pada masa mendatang, karena hal ini tidak efektif menjangkau seluruh sekolah yang ada, sementara kerusakan meubelair sekolah tidak terjadi pada sekolah tertentu saja. Penyediaan meubelair kurun waktu tahun 2006-2008 untuk SD/MI sebanyak 22.101 set, untuk SMP/MTS sebanyak 1.671 dan untuk SMA/MA/SMK sebanyak 1.962 set.

2.1.4. Wilayah dan Tata Ruang

Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa depan yang harus dihadapi Pemerintah dan masyarakat Manggarai untuk mengatasi krisis tata

ruang yang telah terjadi. Hal ini mengandaikan adanya penataan ruang yang konsisten antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; yang pada gilirannya dimaksudkan untuk (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap Bencana, (c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan melalui regulasi tata ruang yang searah dan terpadu dengan semua sektor pembangunan.

Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian memiliki korelasi yang sangat erat dengan masalah pertanahan. Karena tanah merupakan unsur yang paling dominan dari ruang dan sebagai salah satu SDA merupakan modal utama bagi pembangunan nasional dan wajib dikelola secara bijaksana untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama. Untuk itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah yang efektif dan efisien dengan tetap memelihara kelestarian alam lingkungan.

Perlu disadari bahwa tersedianya berbagai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota belum menjamin tercapainya tujuan rencana penyusunan tata ruang itu sendiri secara optimal. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya berbasis pada tata ruang dan kewilayahan. Hal ini disebabkan karena persepsi masyarakat terhadap arti pentingnya pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya menjadi kendala utama dan juga karena regulasi tata ruang dan kewilayahan di Kabupaten Manggarai belum ada terutama setelah pemekaran Kabupaten Manggarai menjadi 3 (tiga) Kabupaten, baik pada tingkat ibukota kabupaten maupun kecamatan dan desa/kelurahan. Akibatnya ialah terjadi tumpang tindih peruntukan penggunaan tanah oleh masyarakat orang perorangan, kelompok masyarakat tertentu, swasta ataupun pemerintah.

2.1.5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup

2.1.5.1. Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam

1) Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 20 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara Geografis wilayah Kabupaten Manggarai terletak diantara 8° LU - $8^{\circ},30$ LS dan $119,30^{\circ}$ - $12,30^{\circ}$ BT, terletak di bagian barat pulau Flores, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

-  Sebelah Barat: Kabupaten Manggarai Barat;
-  Sebelah Utara: Laut Flores;
-  Sebelah Timur: Kabupaten Manggarai Timur;

- ✚ Sebelah Selatan: Laut Sawu.
- 2) Luas wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 1.669,42 Km². Secara administratif Kabupaten Manggarai dibagi menjadi 9 Kecamatan, 132 Desa dan 17 Kelurahan. Pusat Pemerintahan di Kota Ruteng Kecamatan Langke Rembong. Jumlah penduduknya yakni 276.514 jiwa dan 59.909 KK, dengan tingkat Kepadatan penduduk sebesar 165,635 jiwa / Km² (Manggarai Dalam Angka, BPS, 2008).
- 3) Kondisi Geologi dan Topografi.
- ✚ Berdasarkan komposisi jenis tanah di Kabupaten Manggarai terdiri dari (a) Latosol seluas 53,357 km² (31,96%), (b) Mediteran seluas 60,984 km² (36,53%), dan (c) Litosol seluas 52,601 km² (31,51%).
- ✚ Berdasarkan komposisi ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai dari permukaan laut yakni : (a) 0–100 m dpl seluas 28.512 Ha (17,079%) (b) 100–500 dpl seluas 64.362 Ha (38,553%), (c) 500–1.000 dpl seluas 56.528 Ha (33,861%) dan (d) > 1000 m dpl seluas 17.540 Ha (10,507%).
- ✚ Berdasarkan tingkat kemiringan tanah. Kondisi topografi Kabupaten Manggarai ialah berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis. Lahan dengan kemiringan 0-2⁰ mencapai 5.621 Ha (3,367%), 2-15⁰ mencapai 18.732 Ha (11,220%), 15-40⁰ mencapai 52.986 Ha (31,739%) dan > 40⁰ mencapai 89.603 Ha (53,673%). Dengan kondisi topografi yang demikian, mengakibatkan usaha pertanian pada dataran sangat terbatas dan rawan bencana. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah dengan kemiringan yang curam sehingga secara umum produktivitasnya rendah.
- ✚ Berdasarkan jenis penggunaan tanah di Kabupaten Manggarai meliputi perkampungan seluas 1.358 ha, sawah dengan perincian 2 (dua) kali tanam seluas 2.782 ha dan 1 (satu) kali tanam seluas 2.833 ha, tegalan/ladang seluas 32.007 ha, perkebunan seluas 431 ha, kebun campuran seluas 14.540 ha, hutan (baik hutan lebat, hutan belukar dan hutan sejenisnya) seluas 48.990 ha, semak/alang-alang padang rumput seluas 66.791 ha dan danau/kolam/rawa seluas 21 ha.
- 4) Iklim. Secara umum Kabupaten Manggarai mengenal 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti dengan jumlah curah hujan rata-rata 2.440,9 mm. Rata-rata bulan basah setiap tahun yakni 7 (tujuh) bulan.
- 5) Di dalam perut bumi Kabupaten Manggarai mengandung bahan-bahan mineral seperti logam mulia, logam dasar besi dan bahan galian industri seperti batu kapur, tanah

liat, gypsum, pasir, silica, belerang dan lain-lain. Dari sumber daya pertambangan tersebut, hanya beberapa mineral yang telah dieksplorasi seperti mangan, pasir, batu kali. Peranan sektor pertambangan dalam ekonomi di Kabupaten Manggarai masih kecil, yang antara lain karena kendala dengan regulasi yang mengaturnya maupun pengolahan masih secara tradisional atau di luar daerah. Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral di Kabupaten Manggarai masih potensial ditingkatkan. Keterlibatan investor di bidang pertambangan masih rendah. Peraturan daerah maupun nasional belum dapat mendorong iklim investasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi tambang masih rendah.

- 6) Penegakan wilayah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Jalur Hijau belum ditegakkan penuh dan integral, terutama bagi pembangunan perumahan penduduk dan kantor pemerintahan. Karena itu diperlukan keberanian menetapkan wilayah DAS dan Jalur Hijau dalam perencanaan tata ruang wilayah dan penertiban atas bangunan yang didirikan di daerah DAS dan Jalur Hijau.

2.1.5.2. Kondisi Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu agenda pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Manggarai, karena bagi masyarakat Manggarai hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru dan falsafah hidupnya sudah ada. Proses-proses yang diperagakan dalam pembangunan menunjukkan suatu realita akan adanya suatu interaksi dan interelasi kausalitas yang intensif dan kuat antar manusia sebagai subjek pembangunan dan lingkungan hidup sebagai area karyanya, yang disimbolkan dengan ungkapan *gendang oné agu lingko pé'ang*. Karena itu aktivitas pembangunan harus mampu menciptakan dan memuat suatu tugas dan tanggung jawab (*gabe und aufgabe*) untuk melestarikan **potensi lingkungan hidup** dan penataan ruang wilayah demi keselamatan dan kebahagiaan manusia (*kudut mbong ka'éng golo agu riwok ka'éng béo*) dan meningkatkan kesadaran manusia yang menyatu dengan alam dan kembali ke alam (*back to nature*). Potensi lingkungan hidup dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama (*bonum commune*) dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem serta memiliki peran sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan penopang sistem kehidupan (*life support system*). Karena itulah, pemerintah mencanangkan *sustainable development* yang berwawasan lingkungan dalam rangka menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

keseimbangan ekosistem. Meskipun demikian, tantangan pembangunan lingkungan hidup yang masih mengganjal pembangunan di Kabupaten Manggarai seperti: (i) belum terintegrasinya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan pemanfaatan SDA. Akibatnya ialah terjadi konflik kepentingan antara *resource based economy* (ekonomi sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan) dan *life support system*. Aktivitas perekonomian yang dilaksanakan cenderung mengarahkan pada pengeksploitasian SDA dan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum bidang SDA dan lingkungan hidup; (ii) praktik pemanfaatan sumber daya lingkungan dengan cara merusak (penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan beracun, penebangan liar, penyerobotan kawasan hutan lindung dan lain-lain) masih kerap terjadi, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan; (iii) regulasi bidang lingkungan hidup kurang bersinergi dengan regulasi lainnya sehingga terjadi inkonsistensi, tumpang tindih dan bahkan saling bertentangan, yang antara lain ditandai oleh tumpang tindihnya kawasan lindung dengan kegiatan budidaya yang terlihat dari terjadinya perambahan hutan lindung oleh masyarakat untuk perladangan, adanya pemukiman pada kawasan hutan lindung, kondisi kawasan hutan lindung yang tidak terkonversi menjadi hutan produksi (kawasan budidaya), dan adanya eksplorasi tambang di kawasan hutan lindung; (iv) kurang profesionalnya lembaga pengelola lingkungan hidup dalam penanganan masalah lingkungan dan melemahnya koordinasi pengelolaan lingkungan hidup antara tingkat pusat dan daerah; (v) belum tersedianya peta lingkungan hidup yang menginformasikan wilayah-wilayah yang rentan dan rawan terhadap bencana lingkungan; (vi) pelaksanaan pembangunan belum menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berbasis tata ruang kewilayahan, sebagaimana yang selalu didengungkan dan atau disepakati dalam regulasi-regulasi lingkungan hidup internasional; dan (vii) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan belum dilaksanakan semestinya dan penyelamatan ekosistem, flora dan fauna belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian integral dalam pembangunan, sehingga pada wilayah tertentu di Manggarai sudah mulai merasakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kekurangan air baik untuk minum maupun untuk usaha pertanian dan meluasnya lahan kritis.

2.1.5.3. Pembangunan Sumber Daya Kehutanan

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, keadaan ini tentunya didukung dengan keberadaan kawasan hutan di Kabupaten Manggarai yang total luasnya 62.186,36 ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 29.937,76 ha dan Hutan Konservasi seluas 32.248,6 ha. Dalam rangka mempertahankan Kabupaten Manggarai sebagai salah satu kabupaten lumbung pangan di NTT maka pelestarian kawasan hutan merupakan tuntutan yang mesti dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Upaya pelestarian hutan di Kabupaten Manggarai telah dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui berbagai program dan kegiatan, dengan hasilnya hingga tahun 2009 yakni :

1. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan (4.052,30 ha) yang telah direboisasi sejak 2005 sampai dengan 2009 adalah 1.365 Ha yang sumber dananya berasal dari APBD II, APBD I dan APBN dan luas lahan kritis di luar kawasan hutan (10.416 ha) yang telah direhabilitasi melalui kegiatan Hutan Rakyat/Penghijauan seluas 3.729,12 ha. Dengan demikian luas lahan kritis yang telah direhabilitasi dalam kawasan hutan 33,68% dan di luar kawasan hutan 35,80%.
2. Dalam rangka pengembangan hutan tanaman melalui APBD I telah dikembangkan hutan tanaman kayu unggulan lokal (Suren) sampai dengan tahun 2009 seluas 40 Ha.
3. Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan hutan di Kabupaten Manggarai dari tahun 2005 hingga tahun 2009 telah dilaksanakan dengan hasilnya: Jumlah kasus *illegal logging* yang diselesaikan melalui pengadilan dan sudah diputuskan sampai dengan tahun 2009 yaitu 21 kasus, sedangkan kasus penebangan liar (*illegal logging*) dan perambahan hutan yang diselesaikan di luar pengadilan sampai dengan tahun 2009 berjumlah 14 kasus.
4. Kontribusi PAD sektor kehutanan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah Rp. 2.027.141.395,- yang terdiri dari hasil hutan kayu sebesar Rp. 361.447.075,- dan hasil hutan non kayu sebesar Rp. 1.665.694.320,-

Upaya pelestarian hutan di Kabupaten Manggarai masih menemukan persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang bermukim di sekitar kawasan hutan belum terkendali sehingga kasus perambahan dan penebangan liar masih saja terjadi yang menyebabkan tingkat kerusakan hutan (deforestasi) di Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2009 sebesar 0,49 %.

2. Masih ada kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang tidak mengakui lagi batas-batas kawasan hutan yang ada dengan alasan hutan tersebut merupakan *lingko* milik pesekutuan adat yang ada.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan kawasan hutan dan kelestarian hutan.
4. Terbatasnya lahan garapan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

Dalam rangka upaya pelestarian kawasan hutan dan penertiban perambahan hutan telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah dilakukan pada 16 desa.
2. Memotifasi masyarakat untuk melaksanakan konservasi lahan melalui Gerakan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional (GPKAN) yang sampai dengan tahun 2009 sudah dilaksanakan pada 5 kecamatan.
3. Pengamanan kawasan hutan terpadu yang dilaksanakan secara rutin dari tahun 2005 sampai tahun 2009 oleh Polhut, Polres dan Kejaksaan khususnya pada kawasan hutan yang rawan terhadap perambahan hutan dan pembalakan liar.
4. Penertiban peredaran hasil hutan kayu dan non kayu baik di dalam wilayah kabupaten maupun antara wilayah kabupaten dilakukan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2005-2009.
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan melalui kegiatan pengembangan lebah madu yang sampai dengan tahun 2009 telah dilaksanakan pada 3 kecamatan sebanyak 81 koloni.

Melakukan pengembangan hutan rakyat/penghijauan yang sampai dengan tahun 2009 seluas 3.729,12 ha guna mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan akan kayu.

2.1.5.4. Pembangunan Sumber Daya Pertambangan dan Energi

Peran sektor pertambangan di Kabupaten Manggarai masih relatif kecil terhadap perekonomian daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar Rp. 26.336.588/tahun selama periode tahun 1999-2003. Dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata 14,33 %/tahun, maka sektor ini cukup potensial untuk digalakkan bagi penunjang perekonomian berdasarkan hasil identifikasi melalui analisis *economic base strategy* yaitu hasil analisis *Location Quoetion* (LQ) sektor ini memiliki LQ 1,5 (>1) dan Analisis *Shift Share* (SS) yang

mengidentifikasi bahwa sektor ini memiliki *Value Added* yang tinggi, memiliki keunggulan lokasional (ketersediaan sumber daya relatif besar) dengan jenis bahan tambang yang beranekaragam.

Kegiatan pertambangan (kendatipun banyak yang belum memiliki izin usaha) khususnya bahan galian C (pasir dan Batu) telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi pembangunan di Kabupaten Manggarai, antara lain batu kali meningkat dari 5.255,53 m³ (2005) menjadi 104.982,480 m³ (2008), pasir urug dari 8.408,85 m³ (2005) menjadi 15.747,370 m³ (2008) dan pasir pasang dari 7.308,62 m³ (2005) menjadi 22.683,710 m³ (2007). Namun masih banyak juga lokasi penambangan yang belum memiliki izin sehingga dapat dikatakan kegiatan mereka tanpa izin.

Yang menjadi persoalan dalam pembangunan pertambangan ke depan antara lain ialah: pembangunan pertambangan sering memberi *image* merusak lingkungan, terutama disebabkan oleh banyaknya pertambangan tanpa izin (PETI) yang bercirikan mengubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya dan mampu mempengaruhi keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia; masih rendahnya kesadaran masyarakat penambang dalam mengurus izin, yang antara lain disebabkan *kurang atau tidak mengerti hukum*, masih terbatasnya pemanfaatan bahan galian golongan C (industri) pada kebutuhan bangunan dan belum dikembangkan bagi kepentingan yang lain seperti **Feldspar** (untuk industri keramik, gelas dan kaca); **Zeolit** (untuk penjernihan limbah dan kolam ikan, makan ternak dan pengisi tapal gigi); dan sebagainya. Khusus untuk jenis bahan galian berupa mangan belum mampu mendongkrakkan pendapatan asli daerah (PAD), yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya memihak daerah.

2.1.5.5. Pembangunan Penanggulangan Bencana

Wilayah Kabupaten Manggarai memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Banyak hal yang menjadi penyebab terjadi Bencana di Kabupaten Manggarai, antara lain ialah sebagian besar (70,45 %) wilayah kabupaten Manggarai berada pada topografi di atas 40⁰, curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu, perusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembabatan liar hutan dan sebagainya. Selain itu,

sebagaimana wilayah lain di NTT, Kabupaten Manggarai termasuk dalam kawasan *Circum-Pasifik* sehingga memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan).

Yang menjadi persoalan dalam setiap penanganan Bencana di Kabupaten Manggarai antara lain ialah **kurangnya keterpaduan dalam penanganan Bencana**. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan SDM dan iptek untuk memprediksi kemungkinan terjadinya Bencana dan sikap mental sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana yang kurang tanggap terhadap bahaya bencana. Sementara itu belum tersedianya dokumen tanggap darurat bencana (*contingency plan*) sebagai pedoman daerah untuk menanggulangi beberapa jenis bencana yang kerap berlangsung di Manggarai. Peristiwa Bencana di Manggarai terus meningkat dan telah merenggut korban jiwa. Pada tahun 2004 jumlah KK yang tertimpah bencana alam dan bencana sosial sebanyak 1.665 KK dengan 11 orang korban jiwa, meningkat menjadi 43.290 KK dengan korban jiwa 46 orang pada tahun 2007. Jenis bencana yang sering terjadi ialah tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, kekeringan, gagal tanam dan bencana sosial lainnya.

Karena peristiwa bencana alam merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada masa datang, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai sudah merasa penting dan memiliki kiat untuk menanggulangi bencana, seperti pembentukan Badan Penanggulangan Bencana. Bencana berkaitan dengan mitigasi, tanggap darurat, rekonstruksi dan pemulihan.

2.2. TANTANGAN

2.2.1. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

2.2.1.1. Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Manggarai berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing dalam pelbagai sektor pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Manggarai walaupun masih tergolong rendah, namun cenderung meningkat setiap tahun. Kecenderungan ini mengindikasikan dinamika positif perbaikan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Manggarai. Kualitas hidup masyarakat akan meningkat apabila dinamika sektor perekonomian mampu memacu produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru. Karena itu peran sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, kependudukan dan Keluarga Berencana sangat menentukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Manggarai.

2.2.1.2. Sumber Daya Kesehatan

Tantangan pembangunan kesehatan terbesar di Kabupaten Manggarai pada masa mendatang adalah meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar; meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta distribusi tenaga secara merata di setiap wilayah; menekan angka kematian ibu (AKI); menekan angka kematian bayi dan balita; memperbaiki gizi bayi, balita dan ibu hamil; menurunkan prevalensi jenis-jenis penyakit terutama penyakit menular; meningkatkan penyediaan air minum bersih dan sanitasi lingkungan secara merata di setiap wilayah; dan memperbaiki sistem dan prosedur serta kualitas pelayanan kesehatan.

2.2.1.3. Sumber Daya Kependudukan dan Keluarga Berencana

Sebagaimana pada tataran nasional, Kabupaten Manggarai pun dalam 20 tahun mendatang akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2008 sebanyak 278.773 jiwa (BPS) dengan rata-rata pertumbuhan (geometrik) tahun 2003-2008 sebesar 1,5% pertahun. Jika rata-rata pertumbuhan ini konstan, maka kemungkinan penduduk Kabupaten Manggarai akan mencapai 2 (dua) kali lipat dari jumlah sekarang (*double population*) pada tahun 2054. Sejalan dengan itu pelbagai parameter demografi diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi dan ibu. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia nonproduktif. Karena itu, tantangan terbesar masalah kependudukan di Kabupaten Manggarai antara lain ialah menurunkan tingkat pertumbuhan saat ini rata-rata 1,5%; peningkatan laju pertumbuhan penduduk setiap tahun berdampak pada meningkatnya berbagai kebutuhan pangan, sarana dan prasarana pelayanan dasar, terbatasnya lapangan kerja dan usaha, berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat bertambahnya penggunaan lahan untuk pemukiman dan sarana publik; menurunkan rata-rata angka kelahiran per wanita kawin (TFR) dari rata-rata 3,5 menjadi 2 melalui peningkatan penggunaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) terutama bagi kaum pria; meningkatkan

upaya preventif dan promotif kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; penataan administrasi kependudukan yang lebih baik.

2.2.1.4. Sumber Daya Pendidikan

Peningkatan angka partisipasi dan angka kelulusan peserta ujian pada semua level belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pendidikan, karena itu perlu dikaji lebih lanjut faktor-faktor penyebab masih tingginya angka putus sekolah dan menurunnya angka kelulusan. Karena tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Manggarai pada masa mendatang antara lain ialah meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar dan menengah; meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan menengah dengan prioritas utama sekolah kejuruan; meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kependidikan dan pemerataan distribusi tenaga di setiap wilayah dan jenjang pendidikan; meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan; meningkatkan tata kelola pada semua level pendidikan; meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; menekan angka putus sekolah (DO) pada semua level; menurunkan disparitas pendidikan antar wilayah; menuntaskan pendidikan bagi penduduk buta aksara.

Dari tantangan-tantangan tersebut, yang paling krusial dan serius mendapat perhatian ialah persoalan mutu pendidikan, baik mutu lembaga pendidikan maupun mutu lulusannya. Rendahnya kualitas lulusan pendidikan menengah di Kabupaten Manggarai mengakibatkan kecilnya jumlah lulusan pendidikan menengah Kabupaten Manggarai yang masuk ke Perguruan Tinggi berkualitas pada program-program studi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Manggarai.

2.2.1.5. Sumber Daya Pemuda dan Olah Raga

Keberadaan lebih dari 29% penduduk Kabupaten Manggarai dalam kelompok pemuda usia produktif merupakan potensi sumber daya yang bisa menggerakkan percepatan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Namun fakta bahwa lebih dari 90% kelompok usia ini sudah tidak sekolah lagi. Ini berarti bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya tersebut. Karena itu tantangan ke depan ialah meningkatkan keterampilan pemuda usia produktif; membina organisasi pemuda dan karang taruna agar berdaya guna dan berhasil guna; meningkatkan sarana dan prasarana olah raga; meningkatkan pembinaan cabang-cabang olah raga berprestasi; meningkatkan pembinaan cabang olah

raga usia dini; menyelenggarakan turnamen-turnamen berbagai cabang olah raga antar klub dan antar kecamatan secara berjenjang dan berkala.

2.2.1.6. Sumber Daya Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kualitas hidup dan peran perempuan Manggarai pada pelbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal ini antara lain ditandai oleh rendahnya angka indeks pembangunan gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan. Karena itu tantangan terberat terhadap pemberdayaan perempuan di Kabupaten Manggarai pada masa mendatang antara lain ialah mengubah persepsi masyarakat (laki-laki) tentang peran perempuan sebagai subordinasi menjadi setara dengan laki-laki; menempatkan perempuan sebagai sumber daya potensial bagi peningkatan ekonomi daerah; meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan masyarakat; mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan; memberi perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dan eksploitasi.

2.2.1.7. Pembangunan Budaya

Era globalisasi diwarnai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan tragis, yang oleh J. Habermas dinilainya sebagai "kekuatan produktif dalam masyarakat industri maju". Kemajuan itu disertai dengan perguliran informasi dan data rasionalitas melalui mass media komunikasi yang mengakibatkan penghapusan jarak dan memudarnya sebagian peradaban manusia primitif (kebudayaan lokal masyarakat adat tradisional). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Manggarai untuk dapat mempertahankan jati dirinya yang disinyalir mengalami *demanggarainisasi* (Lawang, Robert M.Z., dalam bukunya *Konflik Tanah Di Manggarai, Flores Barat*, 1999). Karena itu, pembangunan manusia pada intinya merupakan pembangunan manusia seutuhnya termasuk budayanya.

Dalam 20 tahun mendatang, persoalan budaya yang akan dihadapi oleh masyarakat Manggarai antara lain mensinergikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan budaya lokal; mendorong penguatan fungsi lembaga adat dalam pembangunan; mengembangkan budaya sebagai alat pemersatu masyarakat Manggarai; mengembangkan budaya sebagai potensi wisata; membina sanggar-sanggar seni budaya;

membangun sarana dan prasarana budaya dan meningkatkan penyelenggaraan pentas seni budaya.

2.2.1.8. Pembangunan bidang Keagamaan

Pembangunan manusia pada intinya merupakan pembangunan manusia seutuhnya, termasuk religiositas manusia. Dinamika interaksi dan interelasi antar agama yang terpelihara cukup baik di Kabupaten Manggarai selama ini tidak terlepas dari upaya pembinaan kerukunan hidup beragama dan kearifan berbagai tokoh agama dan masyarakat dalam memfilterisasi gejolak hubungan antar agama di tingkat nasional dan global. Peran para tokoh agama dan pemerintah sangat dominan mempertahankan harmonisasi hubungan tersebut, di samping kesadaran masyarakat untuk tidak bertindak provokatif menjadi bagian penting dari sikap toleransi. Kendati pun demikian, tantangan ke depan yakni meningkatkan penghayatan dan penginternalisasian ajaran agama dalam kehidupan praktis harian sehingga tidak terjadi kekerasan sosial yang mengatasnamakan ajaran agama; memelihara kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; meningkatkan forum dialog antar umat beragama; meningkatkan ketahanan agama terhadap arus perkembangan globalisasi; meningkatkan peran tokoh-tokoh agama dalam pembangunan; membantu meningkatkan sarana dan prasarana ibadah.

2.2.1.9. Kesejahteraan Sosial

Persoalan kemiskinan merupakan masalah kesejahteraan sosial yang menonjol di Kabupaten Manggarai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai tahun 2008 bahwa jumlah KK miskin masih cukup tinggi yaitu sebesar 62,9%. Tantangan kedepan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan jumlah KK miskin adalah merencanakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor*); meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan); meningkatkan partisipasi dan aksesibilitas masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan; memberi perlindungan terhadap penyandang cacat, anak terlantar dan korban bencana; mensinergikan program pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

2.2.1.10. Sumber Daya Politik

Tantangan terbesar bidang politik dalam 20 tahun ke depan antara lain ialah meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat terutama kaum perempuan kendatipun diperhadapkan pada hambatan-hambatan sosial budaya patriarkat dan kesiapan sumber daya perempuan yang relatif masih terbatas; mendorong peran partai politik sebagai perantara masyarakat dengan wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan pemerintah; mewujudkan iklim demokrasi yang sehat, aman dan dinamis dalam penyelenggaraan setiap perhelatan politik nasional, regional dan lokal; memberi pencerahan kepada masyarakat terhadap kesamaan persepsi tentang peraturan perundangan bidang politik; mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan setiap perhelatan politik nasional, regional dan lokal.

2.2.1.11. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Terciptanya rasa aman dan ketertiban sosial selama 4 (empat) tahun terakhir tentu menimbulkan kegembiraan bagi kehidupan dan kesejahteraan bersama yang berkeadilan. Hal ini tidak berarti bahwa potensi gangguan keamanan dan ketertiban sosial tidak ada dan tidak perlu diantisipasi. Ada beberapa kasus terpendam yang masih dan berpeluang untuk mengganggu keamanan dan ketertiban sosial seperti masalah tanah komunal perlu diwaspadai dan penyelesaian secara tuntas. Selain itu, ada juga gangguan keamanan dan ketertiban sosial lainnya sangat bergantung pada dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap fungsi lembaga penegak hukum. Tantangan kedepan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sosial adalah memetakan potensi-potensi konflik; meningkatkan legitimasi kepemilikan lahan melalui sertifikasi; meningkatkan peran lembaga-lembaga hukum dan lembaga adat dalam penyelesaian konflik pertanahan dan konflik sosial lainnya; meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; meningkatkan peran forum komunikasi intelijen daerah; meningkatkan upaya penegakan peraturan daerah.

2.2.1.12. Pembinaan Hukum dan HAM

Tantangan ke depan untuk mewujudkan pembinaan sistem hukum dan HAM yang benar dan adil di Kabupaten Manggarai antara lain ialah: meningkatkan pembinaan fungsi dan peran lembaga-lembaga hukum daerah; meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

memberantas praktik pemerasan, penyuapan dan mafia peradilan; mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus perkara; mendorong pembuatan peraturan-peraturan daerah yang sesuai perkembangan dinamika sosial masyarakat; mendorong kesetaraan dan keadilan dalam proses hukum.

2.2.1.13. Tata Pemerintahan dan Aparatur (*Good Governance*)

Prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan, kejelasan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan, kejelasan sasaran penerima manfaat pembangunan dan upaya pencegahan kebocoran anggaran merupakan tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Manggarai pada masa mendatang. Hal ini berhubungan erat dengan komitmen perencanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelaksanaan uji efektivitas lembaga penyelenggara pemerintahan dan ketersediaan aparatur pemerintah yang berkualitas.

Kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Kabupaten Manggarai berpengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Kondisi ini disebabkan oleh komposisi sumber daya aparatur yakni pada tahun 2009 PNS yang berpendidikan SD-SMA sebesar 50,93% sedangkan yang berpendidikan Diploma sampai dengan Strata 3 sebesar 49,07%, namun kecenderungan ini terkategori baik mana kala memperhatikan persentasi PNS yang berpendidikan Diploma sampai dengan Strata 3 pada setiap tahun mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2005 hanya sebesar 45,18%.

Rendahnya kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Manggarai yang tercermin antara lain pada dominasi aparatur yang berpendidikan SD sampai SMA hingga tahun 2008 yakni dari 4.814 (51,81%) aparatur PNS berpendidikan SD sampai SMA dan adanya indikasi orientasi aparatur birokrasi pada jabatan struktural masih cukup kuat ketimbang jabatan fungsional merupakan tantangan yang harus dipecahkan pada masa datang oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Tantangan ke depan dihadapi dalam pengelolaan tata pemerintahan dan aparatur yang baik ialah menyusun standar pelayanan minimal (SPM) pada setiap SKPD pelayanan publik; meningkatkan kapasitas aparatur daerah; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan; menyusun rencana penerimaan pegawai negeri sipil (PNS)

sesuai kebutuhan daerah; restrukturisasi lembaga pemerintah daerah sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas (miskin struktur kaya fungsi).

2.2.2. Bidang Ekonomi

2.2.2.1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dalam kurun 2005–2008 mengalami perubahan, dimana pada tahun 2005, kontribusi sektor primer lebih dominan, sedangkan dalam kurun 2006–2008 dominasi sektor tersier lebih tinggi dari sektor primer dan sekunder, namun penyerapan tenaga kerja didominasi sektor primer sebesar 85,8%, sektor sekunder 4,5% dan sektor tersier 9,6%.

Peranan sembilan sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dalam kurun 2006–2008 belum banyak mengalami perubahan. Sektor yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Manggarai masih dari sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peranan ketiga sektor ini tidak tergeser dan komposisinya pun tidak mengalami perubahan yang berarti. Sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai tahun 2006-2008 diikuti sektor jasa-jasa sebagai penyumbang terbesar kedua dan sektor perdagangan, hotel dan restoran penyumbang terbesar ketiga. Sebaliknya peranan sektor industri pengolahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian dan pertambangan dan penyerapan tenaga kerja masih sangat kecil.

Tantangan kedepan ialah meningkatkan peran sektor sekunder khususnya sektor industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan hasil tambang lainnya guna meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja serta terus memacu sektor primer dan tersier; memperkuat struktur perekonomian daerah yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak; memperkuat struktur perekonomian daerah yang mampu mengatasi dampak krisis nasional dan global.

2.2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2005-2008 memperlihatkan fluktuasi, baik yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan eksternal (dalam bentuk gejolak perekonomian nasional dan global serta implementasi kebijakan otonomi daerah) maupun karena perubahan-perubahan internal (dalam bentuk pemekaran kabupaten, bencana alam dan menurunnya daya dukung alam). Tantangan ke depan ialah

meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan pemerataan pembangunan antar wilayah; pertumbuhan ekonomi harus dinikmati oleh masyarakat; mendorong pertumbuhan yang cepat pada sektor tersier tanpa mengabaikan sektor primer yang memiliki daya tahan terhadap krisis perekonomian global dan nasional; meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor sekunder dan tersier sebagai lokomotif dalam penyerapan tenaga kerja dan pengimbang pertumbuhan sektor primer yang terus menurun; mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu menarik minat investor.

2.2.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita

Sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, tingkat PDRB dan Pendapatan per Kapita Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan, walaupun masih lebih rendah dari PDRB dan Pendapatan per Kapita NTT dan Nasional. Tantangan kedepan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat pedesaan dengan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di pedesaan; menekan laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi; meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pesisir; memperluas lapangan usaha di pedesaan; memotivasi masyarakat agar lebih kreatif dalam menangkap berbagai peluang berusaha.

2.2.2.4. Tingkat Kemiskinan

Meski menunjukkan hasil yang baik, namun upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manggarai terlihat belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh persentasi KK miskin di Kabupaten Manggarai pada tahun 2008 (62,9%) yang menurun dari 67,8% pada tahun 2005. Namun tingkat kemiskinan ini masih lebih tinggi dibandingkan persentasi KK miskin tingkat Provinsi NTT tahun 2008 yang sebesar 56,75%. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan kita secara absolut masih tinggi. Tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Manggarai pada masa mendatang adalah meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin; merencanakan pembangunan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor*); meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan; mensinergikan kebijakan pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan; mengoptimalkan potensi ekonomi lokal; menekan laju pertumbuhan penduduk.

2.2.2.5. Sumber Daya Pertanian

- 1) Sektor pertanian umumnya dan subsektor tanaman pangan khususnya memberikan kontribusi yang paling besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Manggarai, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat manggarai berkeja dalam sektor ini. Menurunnya produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi dan palawija) sangat besar pengaruhnya terhadap PDRB. Tantangan besar yang dihadapi ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan secara terus menerus dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk; meningkatkan produktivitas dan produksi serta konsumsi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras; mencegah alih fungsi lahan pertanian potensial; menurunnya kepemilikan lahan sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk; meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan secara terus menerus melalui empat usaha pokok yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi; meningkatkan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil guna meningkatkan nilai tambah; menata kelembagaan petani dan mengembangkan sumber daya petani melalui peningkatan jumlah dan mutu kelompok-kelompok tani; membangun Balai Benih Hortikultura yang dapat menyediakan benih berkualitas, dukungan permodalan, keahlian dan teknologi tepat guna.
- 2) Pembangunan subsektor Perkebunan di Kabupaten Manggarai memiliki peran yang sangat strategis guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani karena produk perkebunan merupakan komoditi perdagangan atau ekspor seperti Kopi, Kakao, Vanili, Jambu Mente, Cengkeh dan Kemiri. Tantangan ke depan dalam sub sektor ini ialah meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman perkebunan melalui perluasan areal tanam dan peremajaan kembali tanaman yang tidak produktif lagi; mendorong ketersediaan benih dan bibit tanaman yang berkualitas; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman; mengembangkan agribisnis perkebunan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing; mewujudkan kemitraan petani, pengusaha dan pemerintah dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.
- 3) Pembangunan subsektor peternakan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, juga diantarpulaukan sebagai pasokan ternak bagi daerah lain, meskipun seluruhnya masih diperdagangkan dalam keadaan hidup. Tantangan yang dihadapi ke depan ialah meningkatkan populasi ternak unggas, kecil dan besar untuk memenuhi kebutuhan

daging masyarakat Manggarai dan untuk dipasarkan antar pulau; mencegah pemotongan dan penjualan sapi betina produktif keluar daerah; meningkatkan penyediaan bibit ternak yang berkualitas; meningkatkan pengetahuan keterampilan peternak; meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga laboratorium kesehatan hewan; mendorong pembangunan industri rumah tangga dan kecil pengolahan daging yang bermutu guna meningkatkan nilai tambah.

- 4) Kabupaten Manggarai memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya (budi daya air tawar dan air payau). Potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Tantangan utama di sektor kelautan dan perikanan ialah meningkatkan produksi perikanan (baik perikanan tangkap, budi daya, maupun perikanan air payau) dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan pendapatan nelayan; meningkatkan produksi tambak; meningkatkan produksi rumput laut; mencegah praktik *illegal fishing*; meningkatkan keterampilan nelayan untuk mengoperasikan kapal-kapal berukuran besar; meningkatkan produksi benih ikan air tawar; meningkatkan ketrampilan petani dan masyarakat pesisir dalam mengolah hasil laut; mendorong masyarakat pedalaman masuk laut melalui program Gerakan Masuk Laut (GEMALA); mewujudkan kemitraan antara pengusaha dengan kelompok nelayan dalam penyediaan modal dan pemasaran hasil.

2.2.2.6. Sumber Daya Perindustrian dan Pengolahan

Perkembangan industri baik industri rumah tangga, kecil dan menengah di Kabupaten Manggarai 3 (tiga) tahun terakhir belum mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini antara lain disebabkan oleh sumber daya (manusia dan modal) belum memadai sehingga kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai masih rendah. Tantangan ke depan ialah peningkatan sumber daya pelaku usaha industri; memfasilitasi permodalan oleh pemerintah dan lembaga keuangan; meningkatkan kualitas produk industri; mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah sesuai potensi lokal; menetapkan regulasi yang kondusif bagi pengembangan industri; menyediakan energi listrik untuk mendukung industri.

2.2.2.7. Sumber Daya Perdagangan, Restoran dan Hotel

Kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama arus distribusi barang dan jasa baik dari dalam maupun dari luar daerah. Peran sektor perdagangan pada tahun-tahun mendatang diharapkan terus meningkat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Tantangan ke depan ialah meningkatkan penyediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara yang memadai; meningkatkan akses pasar regional, nasional dan internasional; mengembangkan pusat perdagangan regional; meningkatkan pemerataan distribusi arus barang dan jasa; menetapkan regulasi bidang perdagangan.

Sektor Pariwisata yang menjadi basis penting bagi peningkatan nilai tambah sub-sektor Hotel dan Restoran memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini dapat dilihat dari arus kunjungan wisatawan yang makin meningkat dari 5.530 orang pada tahun 2008 menjadi 8.250 orang pada tahun 2009. Tantangan ke depan antara lain ialah menetapkan regulasi di bidang perhotelan dan restoran; meningkatkan implementasi Sapta Pesona demi terwujudnya peningkatan arus kunjungan wisatawan; meningkatkan kualitas pelayanan hotel dan restoran untuk menarik konsumen; meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok kesenian yang berbasis budaya lokal; memprogramkan berbagai *event* kebudayaan; meningkatkan penataan dan pengembangan obyek wisata; meningkatkan kerja sama atau kemitraan dalam pemasaran pariwisata; mencegah peredaran narkoba dan penyebaran penyakit HIV/AIDS.

2.2.2.8. Sumber Daya Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai dalam 3 tahun terakhir masih rendah, yaitu rata-rata 3,74%. Hal ini disebabkan belum optimal pemanfaatan jasa lembaga keuangan (Bank) dan semangat berkoperasi sebagai modal usaha. Tantangan utama yang dihadapi ke depan dalam bidang keuangan ialah meningkatkan kesadaran berkoperasi bagi semua lapisan masyarakat Manggarai; mengembangkan koperasi yang sehat; meningkatkan volume usaha koperasi; meningkatkan akses kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya.

2.2.2.9. Lapangan Kerja dan Tenaga Kerja

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat di Kabupaten Manggarai akan mempengaruhi rasio penduduk usia produktif yang terus meningkat pula. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai 7,2 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP (Survey Pendidikan BPS, 2008), dengan demikian komposisi pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Manggarai pada masa 20 tahun mendatang masih didominasi oleh tenaga yang berpendidikan setingkat SD atau kelas 1 SMP. Pertumbuhan penduduk rata-rata 1,5%, pengangguran terbuka sebesar 1,75%, serta 78,86% tenaga kerja berada pada sektor pertanian, mengindikasikan persoalan ketersediaan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang.

Tantangan utama dalam bidang ketenagakerjaan ialah menekan laju pertumbuhan penduduk yang pada gilirannya dapat menekan jumlah pengangguran; meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang tersebar di berbagai sektor pembangunan; menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya; memberikan perlindungan dan advokasi secara optimal kepada tenaga kerja; optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

2.2.2.10. Pembangunan Perdesaan

Meskipun pembangunan di Kabupaten Manggarai selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun ketimpangan masih terjadi, baik antar-wilayah, antar-golongan pendapatan, maupun antara penduduk kota dan desa. Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan ke depan ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perdesaan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja di wilayah perdesaan, menekan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah KK miskin di perdesaan; meningkatkan akses informasi di perdesaan.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

2.2.3.1. Sumber Daya Transportasi

Peranan transportasi darat, laut dan udara sangat penting dan vital untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Manggarai karena berkaitan dengan mobilitas manusia, barang dan jasa. Kondisi saat ini jalan dan jembatan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan antar desa sebagian besar sudah

dibuka dan ditingkatkan, sehingga arus manusia, barang dan jasa semakin lancar. Pada sisi lain, pengerjaan jalan oleh pihak ketiga masih dinilai kualitasnya rendah dan masih cukup banyak jalur jalan dan jembatan yang belum dibuka/dibangun dan di tingkatkan (lapen dan telford).

Kondisi sarana dan prasarana pelabuhan laut Kedindi-Reo sebagai salah satu pelabuhan regional di NTT masih sangat terbatas, sehingga bongkar muat barang antri cukup lama dan menimbulkan biaya tinggi dan tidak disinggahi kapal penumpang. Demikian juga bandara udara Frans Sales Lega sebagai modal transportasi yang lebih cepat efektif dimanfaatkan hanya 7-8 bulan dalam satu tahun juga kapasitas angkutnya terbatas. Kedua masalah di atas sangat berpengaruh terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai dari sektor pengangkutan dan komunikasi. Tantangan utama yang dihadapi ke depan ialah meningkatkan penanganan jalan dan jembatan melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan baru jalan dan jembatan, sementara disisi lain terbatas dana yang bersumber dari pusat dan PAD rendah; meningkatkan kualitas pekerjaan dari para rekanan jasa konstruksi; meningkatkan kualitas pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat; meningkatkan status ruas jalan Ruteng-Reo-Kedindi menjadi jalan nasional; meningkatkan status pelabuhan Kendidi Kecamatan Reok dari status pelabuhan regional menjadi pelabuhan nasional, sehingga dapat disinggahi kapal-kapal besar dan menjadi pelabuhan penumpang, barang dan jasa berskala nasional; menjamin kelancaran arus transportasi udara di Bandara Frans Sales Lega untuk memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa.

2.2.3.2. Akses Terhadap Air Minum Bersih dan Sanitasi

Kabupaten Manggarai memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan air minum bersih baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan. Potensi sumber mata air yang belum dikembangkan sebagai sumber air minum masih cukup banyak. Namun pada wilayah tertentu sumber mata air letaknya lebih rendah dan jauh dari tempat pemukiman warga sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar dan teknologi tepat guna untuk menaikkan air ke tempat pemukiman warga, di samping itu akhir-akhir ini karena banyak hutan yang gundul, mengakibatkan banyak sumber mata air yang mati dan yang lain debitnya sangat terutama pada musim kemarau.

Pada tahun 2009 jumlah KK yang menikmati air minum bersih 39.279 (62,12%) dari jumlah KK seluruhnya 63.231, dan persentase rumah tinggal yang bersanitasi

sebanyak 80,5%. Tantangan utama ke depan ialah meningkatkan konservasi terhadap daerah aliran sungai (DAS) dan sumber-sumber mata air sehingga tidak menimbulkan krisis air pada masa-masa mendatang; menetapkan regulasi daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air; mencegah pembalakan liar/perambahan hutan sebagai kawasan endapan air; memperluas kawasan dan ruang terbuka hijau yang memungkinkan terjadinya pengendapan air; meningkatkan kuantitas dan kualitas sanitasi yang sehat bagi semua lapisan masyarakat baik bermukim di desa, kota dan pesisir pantai.

2.2.3.3. Sumber Daya Energi dan Listrik

Permasalahan utama bidang energi dan kelistrikan ialah kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan, pemerataan distribusi dan kontinuitas suplai. Karenanya yang menjadi tantangan utama pembangunan sumber daya energi dan listrik di Kabupaten Manggarai ke depan ialah meningkatkan pasokan listrik dari sumber-sumber energi alternatif, seperti panas bumi (**geothermal**), tenaga air, tenaga surya, tenaga angin dan biomasa; menjamin pemerataan distribusi listrik ke seluruh wilayah Kabupaten Manggarai; meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menjamin adanya kontinuitas suplai tenaga listrik; menjamin ketersediaan gas untuk kebutuhan rumah tangga dan industri.

2.2.3.4. Pembangunan Permukiman dan Perumahan

Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi mengakibatkan tingginya kebutuhan perumahan layak huni di Kabupaten Manggarai. Karena itu, yang menjadi tantangan ke depan ialah meningkatkan penyediaan fasilitas perumahan dan pemukiman yang layak bagi semua lapisan masyarakat melalui kemitraan dengan Pengusaha dan Perbankan/Lembaga Keuangan; pemukiman kembali bagi penduduk yang tinggal dalam kawasan hutan dan yang terkena bencana; membuka kesempatan melaksanakan program transmigrasi.

2.2.3.5. Sumber Daya Telekomunikasi/Telematika

Penggunaan berbagai jenis sarana dan prasarana telekomunikasi/telematika dan informatika di Kabupaten Manggarai terus meningkat, mulai dari penggunaan telepon, internet, televisi, radio dan lain-lain. Demikian pun media penyiaran (pemerintah dan swasta) berupa radio lokal telah berkembang. Tantangan utama yang dihadapi ke depan ialah menjamin pemerataan jaringan telekomunikasi hingga ke daerah terpencil;

meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang telekomunikasi/telematika; menangkal dampak negatif atas pemanfaatan telekomunikasi/telematika; meningkatkan kualitas media-media penyiaran lokal baik dari aspek peralatan, perizinan, penyiaran maupun jangkauannya.

2.2.3.6. Sumber Daya Air dan Irigasi

Luas lahan sawah beririgasi di Kabupaten Manggarai masih terbatas sehingga produksi belum optimal. Lahan potensial yang belum dikembangkan menjadi lahan produktif masih cukup besar dan belum dimanfaatkan karena terbatasnya sumber air maupun sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya. Tantangan utama dalam meningkatkan sumberdaya air dan irigasi ialah meningkatkan penyediaan sumber daya air dan irigasi untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dalam rangka menciptakan ketahanan pangan masyarakat; mendorong partisipasi masyarakat untuk memelihara saluran air dan irigasi sehingga lahan menjadi produktif sepanjang tahun dan terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan.

2.2.3.7. Sarana Kesehatan

Hidup sehat dan berkualitas tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis baik kuantitas dan kualitas serta merata di seluruh wilayah. Karena itu tantangan pembangunan kesehatan ke depan ialah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara merata di seluruh wilayah kabupaten Manggarai; meningkatkan subsidi biaya kesehatan oleh pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD kabupaten Manggarai bagi penduduk miskin.

2.2.3.8. Sarana Pendidikan

Peningkatan sumber daya manusia yang handal tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, merata dan biaya terjangkau. Karena itu yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan serta merata diseluruh wilayah dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha; meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan ke penduduk.

2.2.4. Wilayah dan Tata Ruang

Pengaturan tata ruang berkaitan dengan pemanfaatan ruang sesuai potensi, batasan kemampuan lahan, efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Tantangan utama ke depan dalam pembangunan wilayah dan tata ruang ialah mengembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah yang efektif dan efisien dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan; melaksanakan pembangunan yang berbasis pada rencana tata ruang dan kewilayahan; meningkatkan kualitas pekerjaan para rekanan pemerintah; mewujudkan rencana tata ruang dan wilayah yang berwawasan ekologis dan mampu menarik investor guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.2.5.1. Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam

- 1) Kondisi topografi Kabupaten Manggarai yang berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan seluruh sektor pembangunan yang sangat berpotensi bencana.
- 2) Banyaknya kekayaan alam berupa bahan-bahan mineral dalam perut bumi Kabupaten Manggarai, maka yang menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya alam ke depan ialah meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber mineral; mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber mineral yang berwawasan lingkungan; mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber mineral yang ada; menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik minat para investor.

2.2.5.2. Kondisi Lingkungan Hidup

Tantangan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai dalam 20 tahun ke depan ialah mengimplementasikan falsafah hidup orang Manggarai *gendang one agu lingko pe'ang dan kudut mbong ka'eng golo agu riwok ka'eng beo* ke dalam perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup; meningkatkan eksistensi hutan dan keseimbangan tata air dan ketersediaan air; meningkatkan manajemen pengelolaan industri dan kegiatan ekonomi lainnya seperti pengolahan hasil-hasil industri, penambangan, perluasan lahan pertanian, perkebunan, pembuangan limbah-limbah industri dan perbengkelan agar tidak

menimbulkan dampak negatif dan pencemaran lingkungan; mengintegrasikan dan mensinergiskan pelbagai pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian serta berwawasan ekologis (selaras alam) dan berkelanjutan; menekan pencemaran atau perusakan ekosistem laut dan pesisir (*illegal fishing*) sebagai akibat penggunaan bahan peledak dalam penangkapan hasil-hasil di laut; membuat regulasi dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten.

2.2.5.3. Pembangunan Sumber Daya Kehutanan

Tantangan dalam pembangunan sumber daya kehutanan di Kabupaten Manggarai dalam 20 tahun ke depan ialah mengintegrasikan dan mensinergiskan hukum adat dan hukum positif dalam penetapan tapal batas kawasan hutan dan penyelesaian masalah perusakan hutan; meningkatkan keterlibatan para hakim adat setempat (*tu'a golo, tua gendang agu tu'a teno*) dalam penyelesaian persoalan-persoalan lingkungan seperti batas kawasan hutan (*pal*), status kawasan (tanah ulayat atau area hutan); meningkatkan penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) baik dalam kawasan hutan lindung maupun di luar kawasan hutan; mencegah upaya deforestasi dan perburuan liar terutama flora dan fauna langka melalui pembuatan regulasi tentang perlindungan terhadap flora dan fauna langka serta kawasan hidupnya; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan mengembangkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan; meningkatkan konservasi dan reboisasi kawasan kritis, baik dalam kawasan maupun luar kawasan hutan menjadi kawasan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapat per kapita masyarakat maupun mengatasi krisis air, krisis energi dan krisis pangan, krisis kayu. Deforestasi dan berkurangnya luasan kawasan hutan baik secara agregat maupun hutan produksi, akan berdampak pada menurunnya produksi kayu, sehingga kayu akan menjadi komoditas yang makin mahal.

2.2.5.4. Pembangunan Sumber Daya Pertambangan dan Energi

Tantangan pembangunan sumber daya pertambangan dan energi 20 tahun ke depan ialah meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dan kesejahteraan bersama masyarakat yang berkeadilan melalui eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber mineral; mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber-sumber mineral tanpa merusak lingkungan hidup atau berwawasan ekologis; memaknai sumber-sumber mineral sebagai titipan dan

warisan dari anak-cucu; membuat regulasi dan komitmen dengan pemerintah di pusat agar mendorong investor menanamkan modalnya di daerah dan sekaligus regulasi yang mengatur tata cara pengolahan yang menguntungkan daerah penghasil sumber-sumber mineral.

2.2.5.5. Pembangunan Penanggulangan Bencana

Kendatipun peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan terjadinya atau peristiwa yang tidak pasti waktunya, namun kondisi geografis dan topografi yang berbukit dengan kemiringan sebagian besar di atas 40° dan luasnya lahan kritis dalam kawasan dan luar kawasan hutan serta curah hujan cukup tinggi setiap tahun menyebabkan Kabupaten Manggarai sangat rentan dengan bencana alam terutama pada musim hujan. Karena itu, tantangan utama ke depan bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Manggarai ialah membangun rasa kepedulian (*sense of action*) bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk menghadapi dan mencegah terjadinya bencana alam; meningkatkan akses informasi tentang peta wilayah rawan bencana; membentuk lembaga dan menetapkan prosedur mulai dari mitigasi, tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga harmonisasi manusia dan alam lingkungannya.

2.3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan di Kabupaten Manggarai mencakupi seluruh sumber kekuatan potensial yang efektif, yang bisa diefektifkan demi terwujudnya kesejahteraan bersama masyarakat Kabupaten Manggarai yang berkeadilan yakni :

- 1) Wilayah Kabupaten Manggarai yang terletak di antara 8° LU - 8°30' LS dan 119,30° - 12,30° BT, dengan ketinggian daerah antara 0 - > 1000 dpl, komposisi jenis tanah yang variatif antara latosol, mediterian dan litosol, topografis yang berbukit-bukit dengan 53,673% terdiri dari area kemiringan tanah > 40°, iklim yang mengenal musim hujan dan kering dan rata kelembaban setahun > 80%.
- 2) Masih cukup banyaknya kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat dan laut yang masih potensial untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- 3) Jumlah penduduk yang cukup besar.
- 4) Animo masyarakat untuk sekolah sangat tinggi yang ditunjang oleh banyaknya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.